



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah



www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id



ptun_palangkaraya



Ptun Palangka Raya



PTUN Palangkaraya



(0536) 3231111

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salah Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu Namu Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rangkaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama kurun waktu 1 tahun dalam bentuk "**Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024**".

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin selaku Koordinator Wilayah dan juga kepada seluruh jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atas bantuan dan arahan yang telah diberikan sehingga pencapaian kinerja baik teknis maupun administrasi selama tahun 2024 dapat berjalan baik dan sebagaimana mestinya. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun 2024 ini merupakan suatu bentuk realisasi pencapaian kinerja selama tahun 1 tahun dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 ini berpedoman pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024. Dalam laporan ini dipaparkan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dibidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Kesekretariatan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Pengawasan serta pelaksanaan tugas lainnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu dibutuhkan saran dan kritik yang sifatnya membangun sebagai bentuk dukungan untuk kesempurnaan laporan di tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari para Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang telah memberikan data kinerja sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik dan dilaporkan tepat waktu.

PALANGKA RAYA, 15 JANUARI 2025

KETUA,



ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.

PERISTIWA PENTING TAHUN 2024

JANUARI

10 JANUARI 2024

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Acara penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Bapak Muhamad Ilham, S.H., M.H. yang diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Penandatanganan Pakta Integritas merupakan suatu pernyataan atau janji terhadap diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.



15 JANUARI 2024

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-33

PERATUN TAHUN 2024



Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-33 PERATUN Tahun 2024 mengusung tema “Tingkatkan Integritas, Peradilan Tata Usaha Negara Berkualitas”. PTUN Palangkaraya mengadakan syukuran di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang diikuti oleh Keluarga Besar PTUN Palangkaraya.

FEBRUARI

2 Februari 2024

PENGADILAN MENGAJAR

Pengadilan Mengajar PTUN Palangkaraya, yaitu Kegiatan Sosialisasi Peradilan Elektronik dilaksanakan di Gedung Bundar Asmaul Husna Kampus IAIN Palangka Raya dengan Tema “Membangun Awareness E-Court Pada Gen Z Untuk Mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi”

Ketua PTUN Palangkaraya Bapak Muhamad Ilham, S.H., M.H. hadir sebagai Narasumber serta turut hadir Wakil Ketua PTUN Palangkaraya Ibu Indah Mayasari, S.H., M.H., Hakim PTUN Palangkaraya Ibu Maryam Nur Hidayati, S.H. dan Ibu Sekar Annisa, S.H.





20 Februari 2024

ACARA SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023

Pelaksanaan Acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 Di Assembly Hall, Balai Sidang Jakarta Convention Center dengan tema "Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat"

Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, dan Delegasi Rusia.

MARET

5 MARET 2024

**PELANTIKAN PC IKAHI SERENTAK DAN RAPAT
KERJA DAERAH (RAKERDA) IKAHI
KALIMANTAN TENGAH**

Ketua PTUN Palangkaraya Bapak Muhamad Ilham, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua PTUN Palangkaraya Ibu Indah Mayasari, S.H., M.H. menghadiri Acara Pelantikan Pengurus IKAHI Cabang Se-Wilayah Kalimantan Tengah Periode 2023-2026 dan Rapat Kerja Daerah Pengurus Daerah IKAHI Kalimantan Tengah.

**APRIL**

3 APRIL 2024

**ANJANGSANA DAN BAKTI SOSIAL IKAHI, IPASPI
DAN DHARMAYUKTI KARTINI CABANG
PALANGKA RAYA**

Ketua PTUN Palangkaraya Bapak Muhammad Ilham, S.H., M.H. didampingi Hakim dan Sekretaris PTUN Palangkaraya bersama dengan Ikatan Hakim (IKAHI) Cabang Palangkaraya, Pengurus Serta Anggota IPASPI dan Dharmayukti Karini Cabang Palangkaraya melaksanakan “Anjarsana dan Bakti Sosial Ke Panti Asuhan Berkah Di Kota Palangka Raya”. Kegiatan ini menjadi wujud dari kebersamaan, rasa sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat. Selain itu juga merupakan wujud komitmen lembaga peradilan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan keadilan di Indonesia.



MEI

6 MEI 2024

SOSIALISASI UPDATE E-COURT

Kegiatan Sosialisasi Update ECourt secara internal di PTUN Palangkaraya pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dihadiri oleh Hakim, Panitera, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Aparatur Sipil Negara dan PPNPN Bagian Kepaniteraan PTUN Palangkaraya.

Panitera Muda Perkara Bpk. Aditya Apriza, S.H. menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.



27-29 MEI 2024

PENGAWASAN REGULER DAN MONEV KINERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Melakukan Kegiatan Pengawasan Reguler dan Monev Kinerja Pengadilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Terhitung sejak tanggal 27 s.d 29 Mei 2024, yang bertugas melakukan pengawasan reguler dan Monev Kinerja adalah Bpk. Sumartanto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTTUN Banjarmasin), Bpk. Sidi Purnomo, S.H. (Panitera Pengganti PTTUN Banjarmasin) dan Bpk. Ahmad Faqihuddin, S.E. (Kasub. Bagian Rencana Program dan Anggaran PTTUN Banjarmasin)

JUNI

20 JUNI 2024

SOSIALISASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Kegiatan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti oleh Ibu Inggrid Bintang Nursanny, S.H. (PPID) dan Operator Bapak Sulimargos Manalu, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama).



JULI

31 JULI 2024

**SOSIALISASI PEDOMAN EKSEKUSI PUTUSAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA**

Kegiatan Sosialisasi Pedoman Eksekusi Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Ruang Media Center PTUN Palangkaraya. Hadir mengikuti kegiatan dimaksud Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) PTUN Palangkaraya yang diperbantukan di Bagian Kepaniteraan.



AGUSTUS

9 AGUSTUS 2024

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH
JABATAN WAKIL KETUA PTUN
PALANGKARAYA**

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua PTUN Palangkaraya Ibu Desy Wulandari, S.H., M.H. Hadir seluruh Hakim PTUN Palangkaraya, Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN PTUN Palangkaraya.



14 AGUSTUS 2024

**PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN
PELANTIKAN KETUA PTUN PALANGKA RAYA**

Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Ketua PTUN Palangkaraya Ibu Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Jalan Bina Praja Timur (Komplek Perkantoran Provinsi Kalsel), Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua PTUN Palangkaraya Dilakukan Oleh Ketua PTTUN Banjarmasin Bapak Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.



17 AGUSTUS 2024
UPACARA PERINGATAN HUT KE-79
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melaksanakan Upacara Bendera Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ke-79 Tahun 2024 dengan tema “NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU” di Lapangan PTUN Palangkaraya

Upacara bendera dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Ibu Desy Wulandari, SH., M.H. dan diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPNPN di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.



17 AGUSTUS 2024
UPACARA PERINGATAN HUT KE-79
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TINGKAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Ibu Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H. mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Ke-79 Tahun 2024 di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.



19 AGUSTUS 2024
UPACARA PERINGATAN HUT KE-79 MAHKAMAH
AGUNG RI TAHUN 2024

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Tema “Peradilan Tangguh, Indonesia Maju” di Halaman Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Upacara Peringatan HUT Ke-79 Mahkamah Agung RI Tahun 2024 dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Bpk. Sujatmiko, S.H., M.H. Hadir mengikuti kegiatan upacara Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta PPNPN PTUN Palangkaraya

19 AGUSTUS 2024
MAHKAMAH AGUNG PEDULI “KUNJUNGAN KE PANTI ASUHAN AL MIM” DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE-79 MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua PTUN Palangkaraya Ibu Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H., Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Ibu Desy Wulandari, S.H., M.H., Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta PPNPN PTUN Palangkaraya melaksanakan “Kunjungan Ke Panti Asuhan AL MIM” yang berlokasi di Jln. Semeru Bukit Hindu Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka Peringatan HUT ke-79 Mahkamah Agung RI.



30 AGUSTUS 2024
PUBLIC CAMPAIGN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Kegiatan *Public Campaign* Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Berokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan bertempat di halaman depan gedung PTUN Palangkaraya Jln. Tjilik Riwut Km.5 Palangka Raya. Ketua PTUN Palangkaraya Ibu Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H. beserta Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Ibu Desy Wulandari, S.H., M.H. mengikuti seluruh acara kegiatan bersama dengan Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta PPNPN pada PTUN Palangkaraya.

SEPTEMBER

4-5 SEPTEMBER 2024
KEGIATAN PENDAMPINGAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA PTUN PALANGKARAYA

Dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pendampingan di PTUN Palangkaraya kepada Bpk. Marta Satria Putra, S.H., M.H. (Kasubdit



Pembinaan Tenaga Teknis
Ditbinganismentun), Ibu Dwi Maria
Puspitasari, S.Kom., M.M. (Kasubbag Mutasi
Sekretariat), dan Ibu Intan Sari Widya
Ningrum, S.H., M.H.(Kasi Statistik dan
Dokumentasi Ditbinganismentun).



27 SEPTEMBER 2024
HARI ULANG TAHUN DHARMAYUKTI KARINI XXII
TAHUN 2024 DI PTUN PALANGKARAYA

Dalam rangka HUT Dharmayukti Karini XXII, Pengurus Cabang Dharmayukti Karini Cabang Palangkaraya mengadakan serangkaian kegiatan di Kantor PTUN Palangkaraya dengan tema “Wanita Tangguh Wujudkan Organisasi Yang Profesional Dan Modern”.



30 SEPTEMBER 2024
LAUNCHING DAN SOSIALISASI APLIKASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

Launching Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Ketua PTUN Palangkaraya Ibu Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi pengenalan aplikasi yang disampaikan oleh Sekretaris PTUN Palangkaraya Ibu Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si. dan PPNPN PTUN Palangkaraya Bpk. Mareh Dayanu, S.Kom (Pembuat Aplikasi).



OKTOBER
28 OKTOBER 2024
UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA
KE-96 TAHUN 2024

Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 dengan tema “Maju Bersama Indonesia Raya” dilaksanakan di halaman depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Upacara bendera dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Ibu Desy Wulandari, SH., M.H. dan diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Aparatur Sipil Negara dan PPNPN di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

NOVEMBER

16 NOVEMBER 2024

BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA PEMILIHAN PADA PILKADA SERENTAK 2024

Ketua PTUN Palangkaraya Ibu Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H. hadir sebagai Pemberi Materi Tata Cara Beracara Sengketa Proses Pemilu di Peradilan Tata Usaha Negara pada kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan pada Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.



DESEMBER

5 DESEMBER 2024

SELEKSI KOMPETENSI PPPK MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024

Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) BKN di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 bertempat di Gedung Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya yang dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Bapak Supriansyah, S.H. dan Tenaga PPNN PTUN Palangkaraya sebagai peserta seleksi kompetensi PPPK 2024 berjumlah 8 (delapan) orang.



PENGHARGAAN PTUN PALANGKARAYA TAHUN 2024

MAHKAMAH AGUNG RI

19 AGUSTUS 2024

ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024

Peringkat II Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi – Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50

ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024		
Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50		
Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	91,01
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	86,91
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	86,19



Peringkat I Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat – Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50

ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024		
Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50		
Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	41,03
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Ponorogo	34,19
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	25,19



Peringkat I Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Eksekusi – Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Beban Perkara 0-50

ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024		
Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50		
Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	41,03
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Ponorogo	34,19
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	25,19



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

14 SEPTEMBER 2024

**LOMBA PENINGKATAN PELAYANAN
PENGADILAN DI LINGKUNGANAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN
2024**

Peringkat II Kategori Pelaporan Perkara
Pengadilan – Peningkatan Pelayanan
Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara Tahun 2024



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

14 SEPTEMBER 2024

**PENGANUGERAHAN KETERBUKAAAN
INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2024**

Badan Publik Informatif Peringkat IX Kategori
Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan
Tengah



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERISTIWA PENTING TAHUN 2024	ii
PENGHARGAAN PTUN PALANGKARAYA TAHUN 2024	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan.....	2
B. Visi dan Misi.....	6
BAB II KEADAAAN PERKARA	9
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ...	10
B. Penyelesaian Perkara.....	39
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	67
A. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024 berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan.....	68
B. Mutasi.....	76
C. Pelantikan	79
D. Pengangkatan CPNS.....	80
E. Promosi.....	81
F. Pensiun.....	82
G. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM Teknis/ Non Teknis.....	82
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN	84
A. Pengelolaan Keuangan	85
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	90
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	93
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	99
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	100
B. Pembangunan Zona Integritas.....	101
C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	103
D. Inovasi Pelayanan Publik.....	109
BAB VI PENGAWASAN	115
A. Internal.....	116
B. Evaluasi	116
BAB VII PENUTUP	118
A. Kesimpulan	119
B. Rekomendasi.....	120
LAMPIRAN	121

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Provinsi Kalimantan Tengah	5
Gambar 2.1 Grafik Keadaan Perkara PTUN Palangkaraya 5 Tahun Terakhir	10
Gambar 2.2 Grafik Jenis Perkara PTUN Palangkaraya	12
Gambar 2.3 Jumlah Perkara di PTUN Palangkaraya Tahun 2024	39
Gambar 5.1 Sertifikat Akreditasi PTUN Palangkaraya	100
Gambar 5.2 Ruang PTSP Tahun 2021	104
Gambar 5.3 Ruang PTSP Tahun 2022	104
Gambar 5.4 Ruang PTSP Tahun 2023	105
Gambar 5.5 Ruang PTSP Tahun 2024.....	105
Gambar 5.6 Ruang Tunggu Tahun 2021	106
Gambar 5.7 Ruang Tunggu Tahun 2022.....	106
Gambar 5.8 Ruang Tunggu Dan Ruang Tunggu Prioritas Tahun 2023	107
Gambar 5.9 Ruang Tunggu Dan Ruang Tunggu Prioritas Tahun 2024	108
Gambar 5.10 Genset 80 KVA (Pengadaan Tahun 2022).....	109
Gambar 5.11 Tampilan Aplikasi Simansur	109
Gambar 5.12 Tampilan WA Center Aplikasi SIYAP	110
Gambar 5.13 Tampilan Aplikasi Simantuel.....	110
Gambar 5.14 Tampilan Aplikasi autoreply Selayang	111
Gambar 5.15 Tampilan Aplikasi internal Sipatuh-SIPP	112
Gambar 5.16 Tampilan aplikasi sipaku.....	112
Gambar 5.17 Tampilan Website baru PTUN Palangkaraya (www.ptun-palangkaraya.go.id)	112
Gambar 5.18 Tampilan Website PPID PTUN Palangkaraya (www.ppid-ptun-palangkaraya.go.id)	113
Gambar 5.19 Piagam Penghargaan PTUN Palangkaraya	114



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Keadaan perkara secara umum PTUN Palangkaraya tahun 2024..	10
Tabel 2.2 Keadaan Perkara Tingkat Pertama	10
Tabel 2.3 Rincian Daftar Sisa Perkara Tahun 2023	11
Tabel 2.4 Rincian daftar perkara masuk tahun 2024	14
Tabel 2.5 Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	16
Tabel 2.6 Rincian daftar perkara yang diajukan ke tingkat banding	17
Tabel 2.7 Rincian daftar perkara banding yang putus tahun 2024	22
Tabel 2.8 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	27
Tabel 2.9 Rincian daftar perkara yang diajukan ke tingkat kasasi	28
Tabel 2.10 Rincian daftar perkara kasasi yang putus pada tahun 2024.....	31
Tabel 2.11 Keadaan Perkara tingkat peninjauan kembali.....	34
Tabel 2.12 Rincian daftar perkara yang diajukan ke tingkat peninjauan kembali	35
Tabel 2.13 Daftar permohonan pengawasan eksekusi putusan	37
Tabel 2.14 Jumlah Sisa Perkara yang diputus	39
Tabel 2.15 Rincian daftar perkara Dismissal	40
Tabel 2.16 Rincian daftar perkara yang dicabut.....	41
Tabel 2.17 Rincian daftar perkara yang putus.....	41
Tabel 2.18 Jumlah Perkara yang putus tepat waktu	45
Tabel 2.19 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ..	46
Tabel 2.20 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	46
Tabel 2.21 Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi	49
Tabel 2.22 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	49
Tabel 2.23 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	52
Tabel 2.24 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	53
Tabel 2.25 Keadaan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali tahun 2024.....	56
Tabel 2.26 Laporan Pelaksanaan Posbakum selama tahun 2024	57



Tabel 3.1 Tenaga Teknis Hakim.....	71
Tabel 3.2 Tenaga Teknis Kepaniteraan.....	72
Tabel 3.3 Pejabat Struktural dan Fungsional.....	73
Tabel 3.4 Tenaga Non Teknis (Pelaksana).....	74
Tabel 3.5 Tenaga PPNPN.....	75
Tabel 3.6 Diklat SDM.....	82
Tabel 4.1 Daftar Realisasi Anggaran 2 DIPA Per 31 Desember 2024	90
Tabel 4.2 Daftar Realisasi PNBK 2 DIPA Per 31 Desember 2024.....	90
Tabel 5.1 Daftar penghargaan PTUN Palangkaraya tahun 2024	114
Tabel 6.1 Daftar Hakim pengawas bidang	113



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara diberbagai negara modern terutama negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.

Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Selain itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi, fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pertama sebagai lembaga control (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum, Kedua sebagai wadah melindungi hakim individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat "*external control*", karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut "*controla posteriori*", karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi "*legalitas*", karena hanya menilai dari segi hukumnya (*rechmatigheid*) saja.

Pejabat administrasi dalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inherent* atau *alszodanig* dalam menunaikan tugas jabatannya, dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa: **"Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau**

suatu pihak dalam suatu bidang tertentu". Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.

Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan termuda dibandingkan dengan peradilan lainnya. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada point d adalah "*Untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara diperlukan suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan Peradilan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat*". Dari konsiderans tersebut diatas maka menjadi jelas, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengontrol tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kontrol Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pejabat Tata Usaha Negara tersebut agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugasnya merugikan kepentingan rakyat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dibaca dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

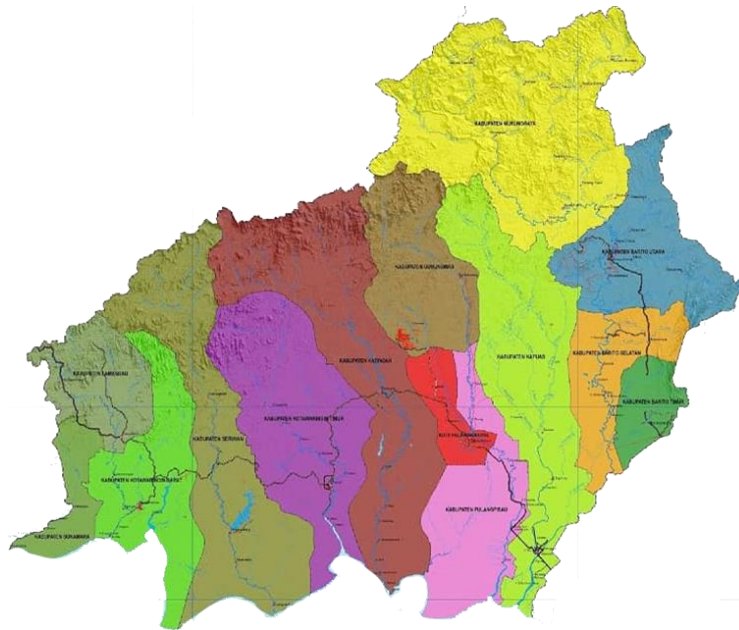
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”***. Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berdiri, semua sengketa tata usaha negara yang melibatkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diwilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Hal tersebut sesuai Pasal 2 Surat Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1992 yang menyebutkan :

“Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat di dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan wilayah Provinsi Tingkat I Kalimantan Timur”.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman RI yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, SH.** Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota Buntok;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota Tamiang Layang;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota Muara Teweh;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota Kuala Kurun;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota Kuala Kapuas;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota Kasongan;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota Pangkalan Bun;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota Sampit;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota Nanga Bulik;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota Puruk Cahu;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota Pulang Pisau;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota Sukamara;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang;
14. Kota Palangka Raya



Gambar 1.1 Peta Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak antara 0°45' Lintang Utara sampai dengan 3°30' Lintang Selatan dan 111° sampai dengan 116° Bujur Timur, dengan luas daratan 153.564 KM² atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia. Kota Palangka Raya secara geografis terletak antara 1°,35' sampai dengan 2°24' Lintang Selatan dan 113°30' sampai dengan 114°04' Bujur Timur. Luas wilayah totalnya 157.983 KM² dengan Jumlah Penduduk sekitar 2.784.971 Jiwa.

Daerah yang paling luas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23.700 KM², kemudian Kabupaten Katingan dengan luas 17.800 KM² dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 KM², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangka Raya dengan luas 2.399,50 KM².

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan ;

Daerah aliran sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Sungai Barito yang melintasi 4 Kabupaten, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas,

Sungai Mentaya, Sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 Kabupaten. Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa TUN sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

B. Visi dan Misi

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung dan Modern"

MISI

1. *Mewujudkan Peradilan yang sederhana, biaya ringan, transparan, dan modern.*
2. *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.*
3. *Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.*
4. *Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua/Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris) setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat program kerja.

Program kerja pada dasarnya meliputi uraian tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme pelaksanaannya berupa pelaporan serta pengawasan.

Untuk mencapai hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melaksanakan program kerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat pembagian tugas (*Job Description*) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada Para Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
2. Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing Hakim menjadi Pengawas Bidang yang tertuang dalam suatu Surat Keputusan No. 691A/KPTUN.W6-TUN4/SK.PW1.1.1/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 Tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilantata Usaha Negara Palangkaraya.
3. Penyelesaian Perkara pada tingkat pertama maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan sejak diterimanya gugatan.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya.
5. Turut serta melakukan pembaruan sistem peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (*Blue Print*) yang dibuat oleh Mahkamah Agung.
6. Berdasarkan amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan dukungan teknologi informasi telah mempunyai *Website* dengan *Homepage*: **<https://www.ptun-palangkaraya.go.id>**.
7. Sebagai perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana dicabut dan diganti terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sejak tahun 2018 sampai sekarang Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang kemudian ditingkatkan kembali pada tahun 2019 dengan penerapan *E-Court* dan MIS (Monitoring Implementasi SIPP).

Dengan program kerja tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir, dan dengan terbentuknya Hakim Pengawas Bidang diharapkan dapat memperkuat pengawasan pelaksanaan program kerja dalam mencapai Visi dan Misi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



BAB II KEADAAN PERKARA

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

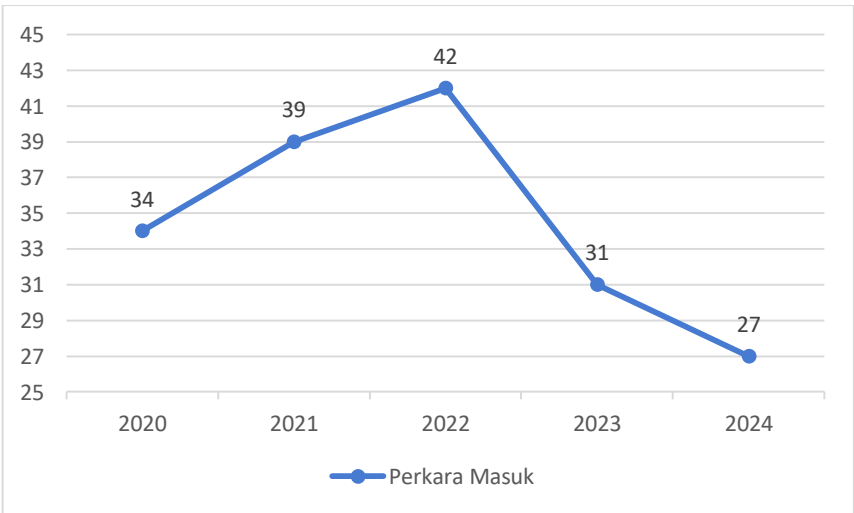
Secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tahun 2024, meliputi sisa perkara tahun 2023 dan perkara yang diterima pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Secara Umum
PTUN Palangkaraya Tahun 2024

❖ Sisa tahun lalu	:	14	perkara
❖ Masuk	:	27	perkara
❖ Dismissal	:	3	perkara
❖ Perlawanan	:	0	perkara
❖ Cabut	:	4	perkara
❖ Putus	:	28	perkara
❖ Sisa akhir tahun	:	6	perkara

Jumlah perkara masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 sebanyak 27 perkara, terdiri dari 9 perkara pertanahan, 1 perkara perizinan, 9 perkara kepala desa dan perangkat desa, 2 perkara tindakan administrasi pemerintah, 1 perkara pergantian antar waktu dan 5 perkara lain-lain. Pada tahun 2023 jumlah perkara masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebanyak 31 perkara. Dengan demikian pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebesar 4 perkara atau 12,90%.

Gambar 2.1 Grafik Keadaan Perkara
PTUN Palangkaraya 5 Tahun Terakhir



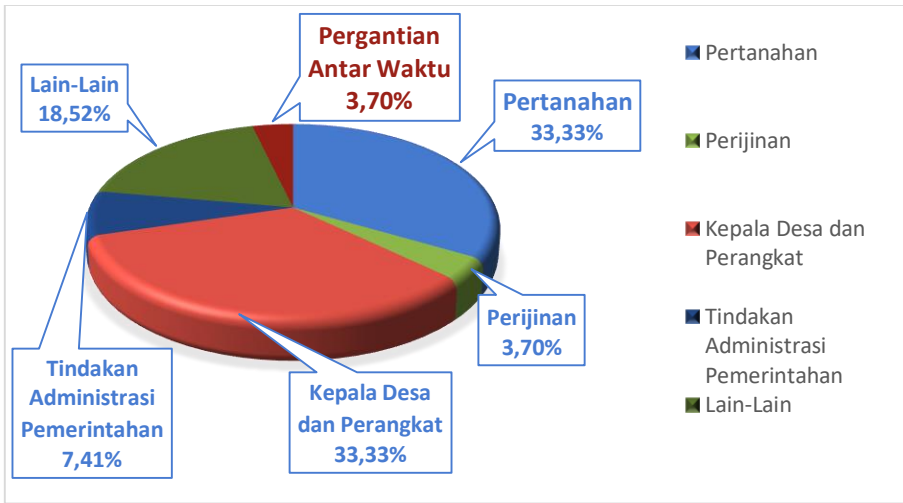
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berikut adalah Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	PERKARA	SISA TH. 2023	MASUK TH. 2024	DISMIS SAL	PERLAW ANAN	CAB UT	PUTUS TH. 2024	SISA TH. 2024	PERSENTASE PENYELESAIA N PERKARA TH. 2024
1	Pertanahan	6	9	-	-	2	10	3	80%
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perijinan	1	1	-	-	-	2	-	100%
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Penga daan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat	4	9	2	-	1	9	1	93%
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	1	-	-	-	-	1	-	100%
10	Pergantian Antar Waktu	-	1	-	-	-	1	-	100%
11	Ketenagakerja an	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	1	-	-	-	-	1	-	100%
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahguna an Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	1	2	-	-	-	3	-	100%
17	Lain-Lain	-	5	1	-	1	1	2	60%
Jumlah		14	27	3	-	4	28	6	

Gambar 2.2 Grafik Jenis Perkara PTUN Palangkaraya



➤ Rincian Daftar Sisa Perkara Tahun 2023

Jumlah sisa perkara tahun 2023 adalah sebanyak 14 perkara. Berikut ini adalah rincian daftar sisa perkara tahun 2023 (Sisa Perkara Tahun Lalu) pada PTUN Palangkaraya.

Tabel 2.3 Rincian Daftar Sisa Perkara Tahun 2023

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL DAFTAR	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
1	13/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	11-08-2023	NIO HERMANTO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO 10. SUMARDIONO 11. SUROSO 12. AHMAD FAUZI 13. FAJRINA RAMADAYANTI 14. KHOIRURROZIKI AHYA 15. IMRAN SETIAWAN 16. YAYAN KUSTIANA 17. IWAN ARIF Rianto 18. ABDURROHMAN 19. HILDA DAMAYANTI 20. HADRI ALI FADLY 21. SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL DAFTAR	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
2	17/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	15-09-2023	AMBUN NURHAYATI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (T.II.INT)
3	18/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	19-09-2023	CATUR KARYA	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNGGU RAYA 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA RUNGGU RAYA KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
4	19/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	20-09-2023	ERWIN NAKALELO	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYU 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
5	20/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	25-09-2023	ELISUMADI	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WURAN 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA WURAN KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
6	21/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	11-10-2023	1. TARMINSIH 2. RISWANDI 3. H. IRAWAN 4. MULIYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL DAFTAR	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
7	22/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	16-10-2023	JOKO WARSITO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
8	23/G/KI/2023/PTUN.PLK (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)	02-11-2023	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
9	24/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	08-11-2023	MAMANSYAH	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GALINGGANG TAHUN 2023
10	25/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-11-2023	EDDY GUNAWAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
11	27/G/TF/2023/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL)	30-11-2023	TABURIANSYAH, S.E., M.M	1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. BADAN / LEMBAGA KEMENTERIAN BPN RI 4. LURAH MENTENG DAN PERANGKATNYA QQ. PEMDA TK II KOTA PALANGKA RAYA QQ. PEMDA TINGKAT I PROVINSI KALTENG QQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
12	28/G/2023/PTUN.PLK (PERIJINAN)	01-12-2023	PT SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Diwakili oleh NIXEN VIOLICK selaku Direktur Utama)	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
13	29/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	11-12-2023	CHRISTOPEL HELMAN, S.E.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA MUHAMMAD MAKI (T.II.INT)

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL DAFTAR	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
14	31/G/SPPU/2023/PTUN. PLK (SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM)	29-12-2023	1. ASHADI JAYA, S.H. 2. TAUFIK HIDAYAT, S.T. 3. Drs. LIHARFANI, M.SI.	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO SELATAN

➤ **Rincian Daftar Perkara Masuk Pada Tahun 2024**

Jumlah perkara masuk pada tahun 2024 adalah sebanyak 27 perkara. Berikut ini adalah rincian daftar perkara masuk tahun 2024 PTUN Palangkaraya.

Tabel 2.4 Rincian daftar perkara masuk tahun 2024

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL MASUK	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
1	1/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	11-01-2024	AKHMADI	BUPATI KAPUAS
2	2/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	11-01-2024	EFRIGUNA, S.P.	BUPATI BARITO TIMUR
3	3/G/TF/2024/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL)	06-02-2024	TABURIANSYAH, S.E., M.M.	1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALTENG 4. MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI
4	4/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	12-02-2024	KARMEN DAGRIA DE SATRIANATA	BUPATI KATINGAN MATNOOR (T.II.INT)
5	5/G/2024/PTUN.PLK (PERIJINAN)	12-02-2024	PT. SEJAHTERA BUMI LESTARI	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
6	6/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	21-02-2024	EPRIGUNA, S.P.	BUPATI BARITO TIMUR

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL MASUK	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
7	7/G/2024/PTUN.PLK (PERGANTIAN ANTAR WAKTU)	15-03-2024	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN KABUPATEN BARITO TIMUR (DIWAKILI OLEH BINA KARYA SELAKU KETUA DAN ANUGERAH PEBRIANTO, S.T. SELAKU SEKRETARIS)	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
8	8/G/TF/2024/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL)	19-03-2024	PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS (DIWAKILI OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR KODIM 1015/SAMPIT (T.II.INT)
9	9/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	28-03-2024	IWAN ILYAS	Pj BUPATI KATINGAN HERIHANDY (T.II.INT)
10	10/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	01-04-2024	HASAN BASRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SITI NURBAYA (T.II.INT)
11	11/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	31-05-2024	ENDRIK PURNAWAN	KEPALA DESA PENYANG
12	12/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	24-06-2024	Drs. EDY LUKMAN HAKIM, M.M.	Pj BUPATI KAPUAS
13	13/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	26-06-2024	ESKE WINEKE JOFRIANY	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PT. POS INDONESIA (PERSERO) (T.II.INT)
14	14/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	16-07-2024	PRIMAHESTI	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
15	15/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-07-2024	1. HARDIANSYAH TUNGGAL 2. Dr. MULYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
16	16/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	06-08-2024	1. HAIDA 2. AHMAD SUPRIADI 3. JEFRI ARYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL MASUK	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
17	17/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	07-08-2024	1. AKHMAD TAFRUJI, S.P 2. IR. PUJO SARWONO	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
18	18/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	06-09-2024	JUTRIANI	KEPALA DESA DANAU
19	19/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	07-10-2024	1. MARKUS SUSANTO, S.E., M.H. 2. LAMROH PHEETA SIHOTANG	KEPALA DESA SUMBER MAKMUR
20	20/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	09-10-2024	AMAT	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
21	21/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-10-2024	RODY. D	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
22	22/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-10-2024	1. RUSNAH 2. MASRANI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
23	23/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	13-11-2024	YATPAPES	1. KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO TIMUR 2. BUPATI BARITO TIMUR
	23/PLW/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	24-12-2024	YATPAPES	1. KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO TIMUR 2. BUPATI BARITO TIMUR
24	24/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	25-11-2024	ENGGANG SUDARTO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
25	25/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	12-12-2024	LAILA PAHRIA	KEPALA DESA PULAU TELO
26	26/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	17-12-2024	1. RUSNAH 2. MASRANI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
27	27/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	20-12-2024	KARYA	PJ. BUPATI KAPUAS

1. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Berikut adalah Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding

Tabel 2.5 Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Perkara	Banding
1	Pertanahan	6
2	Kepegawaian	-
3	Perijinan	2
4	Lingkungan Hidup	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-
6	Badan Hukum/Parpol	-
7	Kepala Desa dan Perangkat	7
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Pergantian Antar Waktu	-
11	Ketenagakerjaan	-
12	KIP	-
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	2
17	Lain-Lain	-
Jumlah		17

➤ **Rincian Daftar Perkara yang Diajukan Ke Tingkat Banding**

Jumlah perkara yang diajukan ke Tingkat Banding adalah sebanyak 17 perkara.

Berikut ini adalah rincian daftar perkara yang diajukan ke Tingkat Banding.

Tabel 2.6 Rincian daftar perkara yang diajukan ke tingkat banding

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJU AN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
1	18/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) CATUR KARYA LAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 3. BADAN PERMUSYAWARATA N DESA RUNGGU RAYA	13-02-2024	CATUR KARYA	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNGGU RAYA 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA RUNGGU RAYA KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023



NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJU AN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
	4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA RUNGGU RAYA KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023			
2	20/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) ELISUMADI LAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARAT AN DESA WURAN 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA WURAN KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023	13-02-2024	ELISUMADI	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WURAN 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA WURAN KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
3	19/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) ERWIN NAKALELO LAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARAT AN DESA DAYU 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023	15-02-2024	ERWIN NAKALELO	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYU 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023



NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJU AN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
4	13/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN) NIO HERMANTO LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO 10.SUMARDIONO 11.SUROS 12.AHMAD FAUZI 13.FAJRINA RAMADAYANTI 14.KHOIRURROZIKI AHYA 15.IMRAN SETIAWAN 16.YAYAN KUSTIANA 17.IWAN ARIF RIANTO 18.ABDURROHMAN 19.HILDA DAMAYANTI 20.HADRI ALI FADLY 21.SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)	16-02-2024	NIO HERMANTO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO 10.SUMARDIONO 11.SUROS 12.AHMAD FAUZI 13.FAJRINA RAMADAYANTI 14.KHOIRURROZIKI AHYA 15.IMRAN SETIAWAN 16.YAYAN KUSTIANA 17.IWAN ARIF Rianto 18.ABDURROHMAN 19.HILDA DAMAYANTI 20.HADRI ALI FADLY 21.SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)
5	17/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN) AMBUN NURHAYATI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	20-02-2024	AMBUN NURHAYATI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (T.II.INT)

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJU AN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (T.II.INT)			
6	21/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN) 1. TARMINSIH 2. RISWANDI 3. H. IRAWAN 4. MULIYADI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)	02-04-2024	1. TARMINSIH 2. RISWANDI 3. H. IRAWAN 4. MULIYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)
7	25/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN) EDDY GUNAWAN LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	06-05-2024	EDDY GUNAWAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
8	28/G/2023/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Diwakili oleh NIXEN VIOLICK selaku Direktur Utama) LAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	31-05-2024	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	PT SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Diwakili oleh NIXEN VIOLICK selaku Direktur Utama)
9	4/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) KARMEN DAGRIA DE SATRIANATA LAWAN	27-06-2024	KARMEN DAGRIA DE SATRIANATA	BUPATI KATINGAN MATNOOR (T.II.INT)



NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJU AN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
	BUPATI KATINGAN MATNOOR (T.II.INT)			
10	6/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) EPRIGUNA, S.P. LAWAN BUPATI BARITO TIMUR	12-07-2024	EPRIGUNA, S.P.	BUPATI BARITO TIMUR
11	9/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) IWAN ILYAS LAWAN Pj BUPATI KATINGAN HERIHANDY (T.II.INT)	30-07-2024	IWAN ILYAS	Pj BUPATI KATINGAN HERIHANDY (T.II.INT)
12	3/G/TF/2024/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL) TABURIANSYAH, S.E., M.M. LAWAN 1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALTENG 4. MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI	05-08-2024	TABURIANSYAH, S.E., M.M.	1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALTENG 4. MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI



NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJU AN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
13	5/G/2024/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT. SEJAHTERA BUMI LESTARI LAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	12-08-2024	PT. SEJAHTERA BUMI LESTARI	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
14	8/G/TF/2024/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL) PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS (Diwakili oleh Pengurus dan Pengawas) LAWAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR KODIM 1015/SAMPIT (T.II.INT)	12-08-2024	PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS (Diwakili oleh Pengurus dan Pengawas)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR KODIM 1015/SAMPIT (T.II.INT)
15	11/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) ENDRIK PURNAWAN LAWAN KEPALA DESA PENYANG	11-10-2024	ENDRIK PURNAWAN	KEPALA DESA PENYANG
16	13/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN) ESKE WINEKE JOFRIANY LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PT. POS INDONESIA (PERSERO) (T.II.INT)	13-11-2024	ESKE WINEKE JOFRIANY	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PT. POS INDONESIA (PERSERO) (T.II.INT)
17	16/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-12-2024	FACHRIAHYANI, S.H Kuasa dari Penggugat: HAIDA SUPRIADI JEPRI ARIYADI MUHAMMAD NURHADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN Intervensi H. EDY SYUHADA, S.E.

➤ **Rincian Daftar Perkara Banding Yang Putus Pada Tahun 2023 Diterima Tahun 2024**

Jumlah perkara banding yang putus pada tahun 2023 diterima tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara.

➤ **Rincian Daftar Perkara Banding Yang Dicabut Di Tahun 2024**

Jumlah perkara banding yang dicabut tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara.

➤ **Rincian Daftar Perkara Banding yang Putus Pada Tahun 2024**

Jumlah perkara banding yang putus pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 perkara. Berikut ini adalah rincian daftar perkara banding yang putus pada tahun 2024.

Tabel 2.7 Rincian daftar perkara banding yang putus pada tahun 2024

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
1	10/G/2023/PTUN.PLK Jo. 94/B/2023/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) LASA LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH (T.II.INT)	30-01-2024	LASA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH (T.II.INT)
2	12/G/2023/PTUN.PLK Jo. 95/B/2023/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) DIDI ROSELL LAWAN BUPATI BARITO UTARA	13-02-2024	BUPATI BARITO UTARA	DIDI ROSELL
3	18/G/2023/PTUN.PLK Jo. 12/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) CATUR KARYA LAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN	25-04-2024	CATUR KARYA	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNGGU RAYA 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA RUNGGU RAYA KECAMATAN PAKU

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
	BARITO TIMUR TAHUN 2023 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNGGU RAYA 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA RUNGGU RAYA KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023			KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
4	17/G/2023/PTUN.PLK Jo. 18/B/2024/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) AMBUN NURHAYATI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (T.II.INT)	02-05-2024	AMBUN NURHAYATI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (T.II.INT)
5	19/G/2023/PTUN.PLK Jo. 17/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) ERWIN NAKALELO LAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYU 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023	02-05-2024	ERWIN NAKALELO	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYU 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
6	20/G/2023/PTUN.PLK Jo. 13/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) ELISUMADI LAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WURAN	03-05-2024	ELISUMADI	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WURAN 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA WURAN KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN



NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
	3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA WURAN KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023			BARITO TIMUR TAHUN 2023
7	13/G/2023/PTUN.PLK Jo. 16/B/2024/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) NIO HERMANTO LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAHI (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO 10. SUMARDIONO 11. SUROSO 12. AHMAD FAUZI 13. FAJRINA RAMADAYANTI 14. KHOIRURROZIKI AHYA 15. IMRAN SETIAWAN 16. YAYAN KUSTIANA 17. IWAN ARIF Rianto 18. ABDURROHMAN 19. HILDA DAMAYANTI 20. HADRI ALI FADLY 21. SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)	15-05-2024	NIO HERMANTO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAHI (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO 10. SUMARDIONO 11. SUROSO 12. AHMAD FAUZI 13. FAJRINA RAMADAYANTI 14. KHOIRURROZIKI AHYA 15. IMRAN SETIAWAN 16. YAYAN KUSTIANA 17. IWAN ARIF Rianto 18. ABDURROHMAN 19. HILDA DAMAYANTI 20. HADRI ALI FADLY 21. SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)



NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
8	21/G/2023/PTUN.PLK Jo. 27/B/2024/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) 1. TARMINSIH 2. RISWANDI 3. H. IRAWAN 4. MULIYADI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)	20-06-2024	1. TARMINSIH 2. RISWANDI 3. H. IRAWAN 4. MULIYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)
9	25/G/2023/PTUN.PLK Jo. 41/B/2024/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) EDDY GUNAWAN LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	06-08-2024	EDDY GUNAWAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
10	28/G/2023/PTUN.PLK Jo. 50/B/2024/PT.TUN.BJM (PERIJINAN) PT SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Diwakili oleh NIXEN VIOLICK selaku Direktur Utama) LAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	06-08-2024	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	PT SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Diwakili oleh NIXEN VIOLICK selaku Direktur Utama)
11	4/G/2024/PTUN.PLK Jo. 62/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) KARMEN DAGRIA DE SATRIANATA LAWAN BUPATI KATINGAN MATNOOR (T.II.INT)	20-08-2024	KARMEN DAGRIA DE SATRIANATA	BUPATI KATINGAN MATNOOR (T.II.INT)

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
12	6/G/2024/PTUN.PLK Jo. 67/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) EPRIGUNA, S.P. LAWAN BUPATI BARITO TIMUR	25-09-2024	EPRIGUNA, S.P.	BUPATI BARITO TIMUR
13	9/G/2024/PTUN.PLK Jo. 70/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) IWAN ILYAS LAWAN Pj BUPATI KATINGAN HERIHANDY (T.II.INT)	15-10-2024	IWAN ILYAS	Pj BUPATI KATINGAN HERIHANDY (T.II.INT)
14	3/G/TF/2024/PTUN.PLK Jo. 73/B/TF/2024/PT.TUN.BJM (TINDAKAN FAKTUAL) TABURIANSYAH, S.E., M.M. LAWAN 1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALTENG 4. MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI	22-10-2024	TABURIANSYAH, S.E., M.M.	5. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 6. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 7. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALTENG 8. MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI
15	8/G/TF/2024/PTUN.PLK Jo. 74/B/TF/2024/PT.TUN.BJM (TINDAKAN FAKTUAL) PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS (Diwakili oleh Pengurus dan Pengawas)	22-10-2024	PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS (Diwakili oleh Pengurus dan Pengawas)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR KODIM 1015/SAMPIT (T.II.INT)

NO	NO PERKARA KLASIFIKASI PERKARA PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
	LAWAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR KODIM 1015/SAMPIT (T.II.INT)			
16	5/G/2024/PTUN.PLK Jo. 75/B/2024/PT.TUN.BJM (PERIJINAN) PT. SEJAHTERA BUMI LESTARI LAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	06-11-2024	PT. SEJAHTERA BUMI LESTARI	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
17.	11/G/2024/PTUN.PLK Jo 84/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	18-12-2024	ENDRIK PURNAWAN	KEPALA DESA PENYANG

2. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Berikut adalah Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Tabel 2.8 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Perkara	Kasasi
1	Pertanahan	3
2	Kepegawaian	-
3	Perijinan	2
4	Lingkungan Hidup	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-
6	Badan Hukum/Parpol	-
7	Kepala Desa dan Perangkat	1
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Pergantian Antar Waktu	-
11	Ketenagakerjaan	-
12	KIP	-
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	2
17	Lain-Lain	-
Jumlah		8

➤ **Rincian Daftar Perkara yang Diajukan Ke Tingkat Kasasi**

Jumlah perkara yang diajukan ke Tingkat Kasasi adalah sebanyak 8 perkara.
Berikut ini adalah rincian daftar perkara yang diajukan ke Tingkat Kasasi.

Tabel 2.10 Rincian daftar perkara yang diajukan ke tingkat kasasi

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJU AN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
1	10/G/2023/PTUN.PLK Jo. 94/B/2023/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) LASA LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH (T.II.INT)	07-02-2024	LASA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH (T.II.INT)
2	12/G/2023/PTUN.PLK Jo. 95/B/2023/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) DIDI ROSELL LAWAN BUPATI BARITO UTARA (tidak diteruskan berkas permohonan kasasinya karena terkena ketentuan Pasal 42A UU MA)	23-02-2024	BUPATI BARITO UTARA	DIDI ROSELL
3	13/G/2023/PTUN.PLK Jo. 16/B/2024/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) NIO HERMANTO LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI	27-05-2024	NIO HERMANTO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
	4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO 10. SUMARDIONO 11. SUROSO 12. AHMAD FAUZI 13. FAJRINA RAMADAYANTI 14. KHOIRURROZIKI AHYA 15. IMRAN SETIAWAN 16. YAYAN KUSTIANA 17. IWAN ARIF Rianto 18. ABDURROHMAN 19. HILDA DAMAYANTI 20. HADRI ALI FADLY 21. SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)			10. SUMARDIONO 11. SUROSO 12. AHMAD FAUZI 13. FAJRINA RAMADAYANTI 14. KHOIRURROZIKI AHYA 15. IMRAN SETIAWAN 16. YAYAN KUSTIANA 17. IWAN ARIF Rianto 18. ABDURROHMAN 19. HILDA DAMAYANTI 20. HADRI ALI FADLY 21. SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)
4	28/G/2023/PTUN.PLK Jo. 50/B/2024/PT.TUN.BJM (PERIJINAN) PT SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Diwakili oleh NIXEN VIOLICK selaku Direktur Utama) LAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	19-08-2024	PT SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Diwakili oleh NIXEN VIOLICK selaku Direktur Utama)	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
5	25/G/2023/PTUN.PLK Jo. 41/B/2024/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) EDDY GUNAWAN LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	20-08-2024	EDDY GUNAWAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA



NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJU AN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
6	8/G/TF/2024/PTUN.PLK Jo. 74/B/TF/2024/PT.TUN.BJM (TINDAKAN FAKTUAL) PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS (Diwakili oleh Pengurus dan Pengawas) LAWAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR KODIM 1015/SAMPIT (T.II.INT)	28-10-2024	PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS (Diwakili oleh Pengurus dan Pengawas)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR KODIM 1015/SAMPIT (T.II.INT)
7	3/G/TF/2024/PTUN.PLK Jo. 73/B/TF/2024/PT.TUN.BJM (TINDAKAN FAKTUAL) TABURIANSYAH, S.E., M.M. LAWAN 1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALTENG 4. MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI	04-11-2024	TABURIANSYAH, S.E., M.M.	1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALTENG 4. MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI
8	5/G/2024/PTUN.PLK Jo. 75/B/2024/PT.TUN.BJM (PERIJINAN) PT. SEJAHTERA BUMI LESTARI LAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	19-11-2024	PT. SEJAHTERA BUMI LESTARI	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

➤ **Rincian Daftar Perkara Kasasi Yang Putus Pada Tahun 2023 Diterima Tahun 2024**

Jumlah perkara kasasi yang putus pada tahun 2023 diterima tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara.

➤ **Rincian Daftar Perkara Kasasi yang Putus Pada Tahun 2024**

Jumlah perkara kasasi yang putus pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 perkara.
Berikut ini adalah rincian daftar perkara kasasi yang putus pada tahun 2024.

Tabel 2.10 Rincian daftar perkara kasasi yang putus pada tahun 2024

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
1	39/G/2022/PTUN.PLK Jo. 48/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 91 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) MISNAWATI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PT. SUKSES MENTAYA ABADI PROPERTI (DIWAKILI OLEH SURYA DHARMA PUTRA SELAKU DIREKTUR) (T.II.INT I) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (T.II.INT II)	27-02-2024	MISNAWATI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PT. SUKSES MENTAYA ABADI PROPERTI (DIWAKILI OLEH SURYA DHARMA PUTRA SELAKU DIREKTUR) (T.II.INT I) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (T.II.INT II)
2	38/G/2022/PTUN.PLK Jo. 45/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 45 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) YAYASAN POKTAN BATU BULAN (DIWAKILI OLEH HODLAND DM, S.E., SELAKU KETUA) LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN PT. KARYA DEWI PUTRA (DIWAKILI OLEH BENHARD RIZAL SETYAWAN SELAKU DIREKTUR) (T.II.INT)	04-03-2024	YAYASAN POKTAN BATU BULAN (DIWAKILI OLEH HODLAND DM, S.E., SELAKU KETUA)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN PT. KARYA DEWI PUTRA (DIWAKILI OLEH BENHARD RIZAL SETYAWAN SELAKU DIREKTUR) (T.II.INT)



NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
3	2/G/2023/PTUN.PLK Jo. 59/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 125 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) 1. Hj. MUSRIFAH 2. Hj. HALIDAH LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA 1. PARTINI 2. ANANG SUKERI 3. KRISTINNELIE 4. SRI HANDAYANI 5. NURHAYATI 6. SUTRISMAN 7. SYAHRANI 8. HARTONO JANAN 9. YANTO 10. SARDI EFENDI 11. JAKA APRIA TANANKU 12. ERNAWATIE (T.II.INT)	06-05-2024	1. Hj. MUSRIFAH 2. Hj. HALIDAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA 1. PARTINI 2. ANANG SUKERI 3. KRISTINNELIE 4. SRI HANDAYAN 5. NURHAYATI 6. SUTRISMAN 7. SYAHRANI 8. HARTONO JANAN 9. YANTO 10. SARDI EFEND 11. JAKA APRIA TANANKU 12. ERNAWATIE (T.II.INT)
4	40/G/2022/PTUN.PLK Jo. 49/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 213 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) SAHIDAR BUNTIT SOEKAH LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (T.II.INT)	12-06-2024	PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (T.II.INT)	SAHIDAR BUNTIT SOEKAH
5	6/G/TF/2023/PTUN.PLK Jo. 78/B/TF/2023/PT.TUN.BJM Jo. 196 K/TUN/TF/2024 (TINDAKAN FAKTUAL) PT. SINGA MULIA KENCANA (Diwakili oleh Drs. Ec. AA. GDE RAKA WIJA, M.Si., selaku DIREKTUR) LAWAN 1. KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	14-06-2024	PT. SINGA MULIA KENCANA (Diwakili oleh Drs. Ec. AA. GDE RAKA WIJA, M.Si., selaku DIREKTUR)	1. KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
6	10/G/2023/PTUN.PLK Jo. 94/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 368 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) LASA LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH (T.II.INT)	11-09-2024	LASA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH (T.II.INT)
7	13/G/2023/PTUN.PLK Jo. 16/B/2024/PT.TUN.BJM Jo. 502 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) NIO HERMANTO LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO 10.SUMARDIONO 11.SUROS 12.AHMAD FAUZI 13.FAJRINA RAMADAYANTI 14.KHOIRURROZI AHYA 15.IMRAN SETIAWAN	15-10-2024	NIO HERMANTO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3.ENY SURYANTI 4.IRAWAN HENRY 5.GUNAWAN HENRY 6.AFRIYANO SUGENG HARIADI 7.RACHEL BUDHIARTI 8.CHITRA DEWI 9.RUDIANTO 10.SUMARDIONO 11.SUROS 12.AHMAD FAUZI 13.FAJRINA RAMADAYANTI 14.KHOIRURROZI AHYA 15.IMRAN SETIAWAN 16.YAYAN KUSTIANA 17.IWAN ARIF Rianto 18.ABDURROHMAN 19.HILDA DAMAYANTI 20.HADRI ALI FADLY 21.SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
	16.YAYAN KUSTIANA 17.IWAN ARIF Rianto 18.ABDURROHMAN 19.HILDA DAMAYANTI 20.HADRI ALI FADLY 21.SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)			
8.	25/G/2023/PTUN.PLK Jo. 41/B/2024/PT.TUN.BJM Jo.801 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) 1.TARMINSIH 2.RISWANDI 3.H. IRAWAN 4.MULIYADI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)	11-1-2024	1.TARMINSIH 2.RISWANDI 3.H. IRAWAN 4.MULIYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)

➤ **Rincian Daftar Perkara Kasasi yang dicabut Pada Tahun 2024**

Jumlah perkara kasasi yang dicabut pada tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara.

3. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Berikut adalah Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Tabel 2.11 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	Perkara	Kasasi
1	Pertanahan	-
2	Kepegawaian	-
3	Perijinan	-
4	Lingkungan Hidup	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-
6	Badan Hukum/Parpol	-
7	Kepala Desa dan Perangkat	1
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Pergantian Antar Waktu	-
11	Ketenagakerjaan	-
12	KIP	-
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-
17	Lain-Lain	-
Jumlah		1

➤ **Rincian Daftar Perkara Peninjauan Kembali Yang Putus Pada Tahun 2023 Diterima Tahun 2024**

Jumlah perkara Peninjauan Kembali yang putus pada tahun 2023 diterima tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara.

➤ **Rincian Daftar Perkara yang Diajukan Ke Tingkat Peninjauan Kembali**

Jumlah perkara yang diajukan ke Tingkat Peninjauan Kembali adalah sebanyak 0 perkara.

➤ **Rincian Daftar Perkara Peninjauan Kembali yang Putus Pada Tahun 2024**

Jumlah perkara Peninjauan Kembali yang putus pada tahun 2024 adalah sebanyak 1 perkara. Berikut ini adalah rincian daftar perkara Peninjauan Kembali yang putus pada tahun 2024.

Tabel 2.12 Rincian daftar perkara peninjauan kembali yang putus pada tahun 2024

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
1	27/G/2022/PTUN.PLK Jo. 21/B/2023/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA) SINGKANG W. KASUMA, S.H., M.H LAWAN BUPATI KAPUAS	19-03-2024	SINGKANG W. KASUMA, S.H., M.H	BUPATI KAPUAS

4. Permohonan Pengawasan Eksekusi

Jumlah Permohonan Pengawasan Eksekusi tahun 2024 adalah sebanyak 4 permohonan.

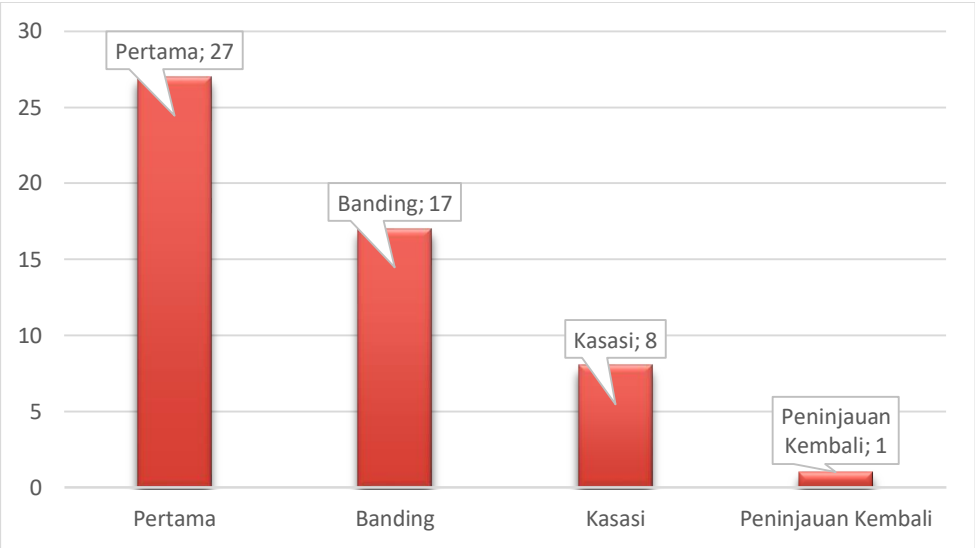
Berikut adalah Tabel Daftar Permohonan Pengawasan Eksekusi Putusan

Tabel 2.13 Daftar Permohonan Pengawasan Eksekusi Putusan

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN EKSEKUSI	PEMOHON EKSEKUSI	TERMOHON EKSEKUSI
1	11/G/2020/PTUN.PLK Jo. 303/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 192 K/TUN/2021 Jo. 143 PK/TUN/2022 (PERTANAHAN) SUHANDI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN BARAT MUHAMMAD JAINURI (T.II.INT)	07-03-2024	SUHANDI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN BARAT

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN EKSEKUSI	PEMOHON EKSEKUSI	TERMOHON EKSEKUSI
2	<p>30/G/2019/PTUN.PLK Jo. 252/B/2020/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN)</p> <p>PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Diwakili oleh Ir. BINSAR MANURUNG selaku Presiden Direktur)</p> <p>LAWAN</p> <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</p> <p>DINNO ZULFIKAR WALUYAN (T.II.INT)</p>	13-09-2024	PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR (Diwakili oleh Ir. BINSAR MANURUNG selaku Presiden Direktur)	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
3	<p>15/G/KI/2021/PTUN.PLK Jo. 500 K/TUN/KI/2021 (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)</p> <p>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS</p> <p>LAWAN</p> <p>KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI</p>	17-10-2024	KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
4	<p>12/G/2017/PTUN.PLK Jo. 306/B/2017/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN)</p> <p>MIRHANUDIN AL FAIZAL</p> <p>LAWAN</p> <p>KEPALA DESA BANGKUANG, KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p>KEPALA DUSUN BINA BISMA (T.II.INT)</p>	18-11-2024	MIRHANUDIN AL FAIZAL	KEPALA DESA BANGKUANG, KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING, KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Gambar 2.3 Jumlah Perkara di PTUN Palangkaraya Tahun 2024



B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Tabel 2.14 Jumlah Sisa Perkara yang diputus

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN			KETERANGAN
		DITOLAK	DIKABUL	TIDAK DITERIMA (NO)	
1	27/G/TF/2023/PTUN.PLK			16 Januari 2024	
2	2/G/2024/PTUN.PLK				Dicabut, 18 Januari 2024
3	31/G/SPPU/2023/PTUN.PLK			24 Januari 2024	
4	18/G/2023/PTUN.PLK	31 Januari 2024			
5	19/G/2023/PTUN.PLK	31 Januari 2024			
6	20/G/2023/PTUN.PLK	31 Januari 2024			
7	13/G/2023/PTUN.PLK			05 Februari 2024	
8	23/G/KI/2023/PTUN.PLK		06 Februari 2024		
9	17/G/2023/PTUN.PLK			07 Februari 2024	
10	22/G/2023/PTUN.PLK			22 Februari 2024	
11	24/G/2023/PTUN.PLK			20 Maret 2024	
12	21/G/2023/PTUN.PLK			21 Maret 2024	
13	25/G/2023/PTUN.PLK			24 April 2024	
14	1/G/2024/PTUN.PLK	07 Mei 2024			
15	28/G/2023/PTUN.PLK		20 Mei 2024		
16	29/G/2023/PTUN.PLK		30 Mei 2024		
17	4/G/2024/PTUN.PLK	26 Juni 2024			
18	7/G/2024/PTUN.PLK			27 Juni 2024	
19	6/G/2024/PTUN.PLK	01 Juli 2024			
20	3/G/TF/2024/PTUN.PLK			23 Juli 2024	
21	9/G/2024/PTUN.PLK	25 Juli 2024			
22	5/G/2024/PTUN.PLK	30 Juli 2024			
23	8/G/TF/2024/PTUN.PLK			31 Juli 2024	
24	10/G/2024/PTUN.PLK			28 Agustus 2024	
25	17/G/2024/PTUN.PLK				Dismissal, 28 Agustus 2024

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN			KETERANGAN
		DITOLAK	DIKABUL	TIDAK DITERIMA (NO)	
26	15/G/2024/PTUN.PLK				Dicabut, 17 September 2024
27	14/G/2024/PTUN.PLK				Dicabut, 24 September 2024
28	18/G/2024/PTUN.PLK				Dismissal, 02 Oktober 2024
29	11/G/2024/PTUN.PLK			04 Oktober 2024	
30	12/G/2024/PTUN.PLK			29 Oktober 2024	
31	20/G/2024/PTUN.PLK				Dicabut, 05 November 2024
32	13/G/2024/PTUN.PLK			06 November 2024	
33	22/G/2024/PTUN.PLK			04 Desember 2024	
34	16/G/2024/PTUN.PLK			05 Desember 2024	
35	25/G/2024/PTUN.PLK				Dismissal, 23 Desember 2024
36	19/G/2024/PTUN.PLK				Belum Putus
37	21/G/2024/PTUN.PLK				Belum Putus
38	24/G/2024/PTUN.PLK				Belum Putus
39	26/G/2024/PTUN.PLK				Belum Putus
40	23/G/2024/PTUN.PLK				Belum Putus Dismissal, 12 Desember 2024 Perlawanan, 24 Desember 2024
41	27/G/2024/PTUN.PLK				Belum Putus
				Putusan:	35
				Ditolak:	8
				Dikabulkan:	3
				Tidak Diterima (NO):	17
				Dismissal :	3
				Cabut :	4
				Belum Putus :	6

➤ **Rincian Daftar Perkara Dismissal**

Jumlah perkara Dismissal tahun 2024 adalah sebanyak 3 perkara. Berikut ini adalah rincian daftar perkara Dismissal PTUN Palangkaraya.

Tabel 2.15 Rincian daftar perkara Dismissal

NO	NO PERKARA	TANGGAL	PENGUGAT /	TERGUGAT / TERMOHON
	KLASIFIKASI PERKARA	MASUK	PEMOHON	
1	17/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) <i>Tidak Lolos Dismissal</i>	07/08/2024	1. AKHMAD TAFRUJI,S.P 2. IR.PUJO SARWONO	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
2	18/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA) <i>Tidak Lolos Dismissal</i>	06/09/2024	JUTRIANI	KEPALA DESA DANAU

NO	NO PERKARA	TANGGAL	PENGUGAT /	TERGUGAT / TERMOHON
	KLASIFIKASI PERKARA	MASUK	PEMOHON	
3	25/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) <i>Tidak Lolos Dismissal</i>	12/12/2024	LAILA PAHRIA	KEPALA DESA PULAU TELO

➤ **Rincian Daftar Perkara Perlawanan Dismissal**

Jumlah perkara perlawanan dismissal tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara. Namun terdapat 1 perkara (23/G/2024/PTUN.PLK) tidak lolos dismissal mengajukan perlawanan yang belum diputus.

➤ **Rincian Daftar Perkara yang Dicabut**

Jumlah perkara yang dicabut tahun 2024 adalah sebanyak 4 perkara. Berikut ini adalah rincian daftar perkara yang dicabut pada PTUN Palangkaraya

Tabel 2.16 Rincian daftar perkara yang dicabut

NO	NO PERKARA &	TANGGAL	PENGUGAT /	TERGUGAT / TERMOHON
	KLASIFIKASI PERKARA	DICABUT	PEMOHON	
1	2/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	18/01/2024	EFRIGUNA, S.P.	BUPATI BARITO TIMUR
2	15/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	17/09/2024	1. HARDIANSYAH TUNGGAL 2. Dr. MULYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
3	14/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	24/09/2024	PRIMAHESTI	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4	20/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	05/11/2024	AMAT	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

➤ **Rincian Daftar Perkara yang Putus**

Jumlah perkara yang putus tahun 2024 adalah sebanyak 28 perkara. Berikut ini adalah rincian daftar perkara yang putus pada PTUN Palangkaraya

Tabel 2.17 Rincian daftar perkara yang putus

NO	NO PERKARA &	TANGGAL	PENGUGAT /	TERGUGAT / TERMOHON
	KLASIFIKASI PERKARA	PUTUS	PEMOHON	
1	27/G/TF/2023/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL)	16 Januari 2024	TABURIANSYAH, S.E., M.M	1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. BADAN / LEMBAGA KEMENTERIAN BPN RI



NO	NO PERKARA & KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
				4. LURAH MENTENG DAN PERANGKATNYA QQ. PEMDA TK II KOTA PALANGKA RAYA QQ. PEMDA TINGKAT I PROVINSI KALTENG QQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
2	31/G/SPPU/2023/PTUN. PLK (SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM)	24 Januari 2024	1. ASHADI JAYA, S.H. 2. TAUFIK HIDAYAT, S.T. 3. Drs. LIHARFANI, M.Si.	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO SELATAN
3	18/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	31 Januari 2024	CATUR KARYA	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNGGU RAYA 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA RUNGGU RAYA KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
4	19/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	31 Januari 2024	ERWIN NAKALELO	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYU 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
5	20/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	31 Januari 2024	ELISUMADI	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WURAN 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA WURAN KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
6	13/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	05 Februari 2024	NIO HERMANTO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1)

NO	NO PERKARA & KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
				2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDIANTO 10. SUMARDIONO 11. SUROSO 12. AHMAD FAUZI 13. FAJRINA RAMADAYANTI 14. KHOIRURROZI AHYA 15. IMRAN SETIAWAN 16. YAYAN KUSTIANA 17. IWAN ARIF Rianto 18. ABDURROHMAN 19. HILDA DAMAYANTI 20. HADRI ALI FADLY 21. SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)
7	23/G/KI/2023/PTUN.PLK (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)	06 Februari 2024	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
8	17/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	07 Februari 2024	AMBUN NURHAYATI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (T.II.INT)
9	22/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22 Februari 2024	JOKO WARSITO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
10	24/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	20 Maret 2024	MAMANSYAH	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GALINGGANG TAHUN 2023
11	21/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	21 Maret 2024	1. TARMINSIH 2. RISWANDI 3. H. IRAWAN 4. MULIYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)
12	25/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	24 April 2024	EDDY GUNAWAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
13	1/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	07 Mei 2024	AKHMADI	BUPATI KAPUAS

NO	NO PERKARA & KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
14	28/G/2023/PTUN.PLK (PERIJINAN)	20 Mei 2024	PT SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Diwakili oleh NIXEN VIOLICK selaku Direktur Utama)	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
15	29/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	30 Mei 2024	CHRISTOPEL HELMAN, S.E.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA MUHAMMAD MAKI (T.II.INT)
16	4/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA)	26 Juni 2024	KARMEN DAGRIA DE SATRIANATA	BUPATI KATINGAN MATNOOR (T.II.INT)
17	7/G/2024/PTUN.PLK (PERGANTIAN ANTAR WAKTU)	27 Juni 2024	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN KABUPATEN BARITO TIMUR (DIWAKILI OLEH BINA KARYA SELAKU KETUA DAN ANUGERAH PEBRIANTO, S.T. SELAKU SEKRETARIS)	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
18	6/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	01 Juli 2024	EPRIGUNA, S.P.	BUPATI BARITO TIMUR
19	3/G/TF/2024/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL)	23 Juli 2024	TABURIANSYAH, S.E., M.M.	1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALTENG 4. MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI
20	9/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	25 Juli 2024	IWAN ILYAS	Pj BUPATI KATINGAN HERIHANDY (T.II.INT)
21	5/G/2024/PTUN.PLK (PERIJINAN)	30 Juli 2024	PT. SEJAHTERA BUMI LESTARI	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
22	8/G/TF/2024/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL)	31 Juli 2024	PERKUMPULAN KELOMPOK TANI KARYA BARU DELAPAN BELAS (DIWAKILI OLEH PENGURUS DAN PENGAWAS)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR KODIM 1015/SAMPIT (T.II.INT)
23	10/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28 Agustus 2024	HASAN BASRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SITI NURBAYA (T.II.INT)

NO	NO PERKARA & KLASIFIKASI PERKARA	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
24	11/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	04 Oktober 2024	ENDRIK PURNAWAN	KEPALA DESA PENYANG
25	12/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	29 Oktober 2024	Drs. EDY LUKMAN HAKIM, M.M.	Pj BUPATI KAPUAS
26	13/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	06 November 2024	ESKE WINEKE JOFRIANY	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PT. POS INDONESIA (PERSERO) (T.II.INT)
27	22/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	04 Desember 2024	1. RUSNAH 2. MASRANI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
28	16/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	05 Desember 2024	1. HAIDA 2. AHMAD SUPRIADI 3. JEFRI ARYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

2. Jumlah Perkara yang putus tepat waktu

Tabel 2.18 Jumlah Perkara yang putus tepat waktu

NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2024			
	KURANG DARI 3 BULAN	3 - 5 BULAN	5 - 12 BULAN	LEBIH DARI 12 BULAN
1			13/G/2023/PTUN.PLK	
2		17/G/2023/PTUN.PLK		
3		18/G/2023/PTUN.PLK		
4		19/G/2023/PTUN.PLK		
5		20/G/2023/PTUN.PLK		
6			21/G/2023/PTUN.PLK	
7		22/G/2023/PTUN.PLK		
8		23/G/KI/2023/PTUN.PLK		
9		24/G/2023/PTUN.PLK		
10			25/G/2023/PTUN.PLK	
11	27/G/TF/2023/PTUN.PLK			
12			28/G/2023/PTUN.PLK	
13			29/G/2023/PTUN.PLK	
14	31/G/SPPU/2023/PTUN.PLK			
15		1/G/2024/PTUN.PLK		
16			3/G/TF/2024/PTUN.PLK	
17		4/G/2024/PTUN.PLK		
18			5/G/2024/PTUN.PLK	
19		6/G/2024/PTUN.PLK		
20		7/G/2024/PTUN.PLK		
21		8/G/TF/2024/PTUN.PLK		
22		9/G/2024/PTUN.PLK		
23		10/G/2024/PTUN.PLK		

NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2024			
	KURANG DARI 3 BULAN	3 - 5 BULAN	5 - 12 BULAN	LEBIH DARI 12 BULAN
24		11/G/2024/PTUN.PLK		
25		12/G/2024/PTUN.PLK		
26		13/G/2024/PTUN.PLK		
27		16/G/2024/PTUN.PLK		
28	22/G/2024/PTUN.PLK			
Jumlah	3	18	7	0

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Tabel 2.19 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

NO	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA BANDING
1	Pertanahan	6
2	Kepegawaian	0
3	Perijinan	0
4	Lingkungan Hidup	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/Parpol	0
7	Kepala Desa dan Perangkat	5
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	1
10	Pergantian Antar Waktu	1
11	Ketenagakerjaan	0
12	KIP	1
13	Pengadaan Tanah	0
14	Fiktif Positif	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	1
17	Lain-Lain	3
Jumlah		18

➤ Rincian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Tabel 2.20 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
1	27/G/TF/2023/PTUN.PLK (TINDAKAN FAKTUAL)	16-01-2024	TABURIANSYAH, S.E., M.M	1. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
				2. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA 3. BADAN / LEMBAGA KEMENTERIAN BPN RI 4. LURAH MENTENG DAN PERANGKATNYA QQ. PEMDA TK II KOTA PALANGKA RAYA QQ. PEMDA TINGKAT I PROVINSI KALTENG QQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
2	2/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	18-01-2024	EFRIGUNA, S.P.	BUPATI BARITO TIMUR
3	31/G/SPPU/2023/PTUN.PLK (SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM)	24-01-2024	1. ASHADI JAYA, S.H. 2. TAUFIK HIDAYAT, S.T. 3. Drs. LIHARFANI, M.Si.	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO SELATAN
4	23/G/KI/2023/PTUN.PLK (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)	06-02-2024	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
5	22/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-02-2024	JOKO WARSITO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
6	24/G/2023/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	20-03-2024	MAMANSYAH	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GALINGGANG TAHUN 2023
7	1/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	07-05-2024	AKHMADI	BUPATI KAPUAS
8	29/G/2023/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	30-05-2024	CHRISTOPEL HELMAN, S.E.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA MUHAMMAD MAKI (T.II.INT)

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
9	7/G/2024/PTUN.PLK (PERGANTIAN ANTAR WAKTU)	27-06-2024	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN KABUPATEN BARITO TIMUR (Diwakili oleh BINA KARYA selaku Ketua dan ANUGERAH PEBRIANTO, S.T. selaku Sekretaris)	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
10	10/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-08-2024	HASAN BASRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SITI NURBAYA (T.II.INT)
11	17/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	28-08-2024	1. AKHMAD TAFRUJI, S.P 2. IR.PUJO SARWONO	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
12	15/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	17-09-2024	1.HARDIANSYAH TUNGGAL 2.Dr. MULYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
13	14/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	24-09-2024	PRIMAHESTI	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
14	18/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	02-10-2024	JUTRIANI	KEPALA DESA DANAU
15	12/G/2024/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	29-10-2024	Drs. EDY LUKMAN HAKIM, M.M.	Pj. BUPATI KAPUAS
16	20/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	05-11-2024	AMAT	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
17	22/G/2024/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	04-12-2024	1. RUSNAH 2.MASRANI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
18	25/G/2024/PTUN.PLK (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	23-12-2024	LAILA PAHRIA	KEPALA DESA PULAU TELO

4. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tabel 2.21 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

NO	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA KASASI
1	Pertanahan	2
2	Kepegawaian	0
3	Perijinan	0
4	Lingkungan Hidup	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/Parpol	0
7	Kepala Desa dan Perangkat	7
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	0
10	Pergantian Antar Waktu	0
11	KIP	0
12	Pengadaan Tanah	0
13	Fiktif Positif	0
14	Tindakan Administrasi Pemerintahan	0
15	Lain-Lain	0
Jumlah		9

➤ Rincian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tabel 2.22 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
1	<p>18/G/2023/PTUN.PLK Jo. 12/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)</p> <p>CATUR KARYA</p> <p>LAWAN</p> <p>1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNGGU RAYA 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA</p>	25-04-2024	CATUR KARYA	<p>1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNGGU RAYA 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA RUNGGU RAYA KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023</p>



NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
	5. DESA RUNGGU RAYA KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023			
2	17/G/2023/PTUN.PLK Jo. 18/B/2024/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) AMBUN NURHAYATI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (T.II.INT)	02-05-2024	AMBUN NURHAYATI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (T.II.INT)
3	19/G/2023/PTUN.PLK Jo. 17/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) ERWIN NAKALELO LAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYU 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023	02-05-2024	ERWIN NAKALELO	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYU 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
4	20/G/2023/PTUN.PLK Jo. 13/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) ELISUMADI LAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WURAN 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	03-05-2024	ELISUMADI	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WURAN 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA



NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
	SERENTAK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 4. PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA WURAN KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023			WURAN KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023
5	21/G/2023/PTUN.PLK Jo. 27/B/2024/PT.TUN.BJM (PERTANAHAN) 1. TARMINSIH 2. RISWANDI 3. H. IRAWAN 4. MULIYADI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)	20-06-2024	1. TARMINSIH 2. RISWANDI 3. H. IRAWAN 4. MULIYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)
6	4/G/2024/PTUN.PLK Jo. 62/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) KARMEN DAGRIA DE SATRIANATA LAWAN BUPATI KATINGAN MATNOOR (T.II.INT)	20-08-2024	KARMEN DAGRIA DE SATRIANATA	BUPATI KATINGAN MATNOOR (T.II.INT)
7	6/G/2024/PTUN.PLK Jo. 67/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) EPRIGUNA, S.P. LAWAN BUPATI BARITO TIMUR	25-09-2024	EPRIGUNA, S.P.	BUPATI BARITO TIMUR

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
8	9/G/2024/PTUN.PLK Jo. 70/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA) IWAN ILYAS LAWAN Pj BUPATI KATINGAN HERIHANDY (T.II.INT)	15-10-2024	IWAN ILYAS	Pj BUPATI KATINGAN HERIHANDY (T.II.INT)
9	11/G/2024/PTUN.PLK Jo 84/B/2024/PT.TUN.BJM (KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA)	18-12-2024	ENDRIK PURNAWAN	KEPALA DESA PENYANG

5. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Tabel 2.23 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

NO	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI
1	Pertanahan	7
2	Kepegawaian	0
3	Perijinan	0
4	Lingkungan Hidup	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/Parpol	0
7	Kepala Desa dan Perangkat	0
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	0
10	Pergantian Antar Waktu	0
11	Ketenagakerjaan	0
12	KIP	0
13	Pengadaan Tanah	0
14	Fiktif Positif	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	1
17	Lain-Lain	0
Jumlah		8

➤ **Rincian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali**

Tabel 2.24 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

NO	NO PERKARA & KLASIFIKASI PERKARA	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
1	<p>39/G/2022/PTUN.PLK Jo. 48/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 91 K/TUN/2024 (PERTANAHAN)</p> <p>MISNAWATI</p> <p>LAWAN</p> <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR</p> <p>PT. SUKSES MENTAYA ABADI PROPERTI (DIWAKILI OLEH SURYA DHARMA PUTRA SELAKU DIREKTUR) (T.II.INT I)</p> <p>PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (T.II.INT II)</p>	MISNAWATI	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR</p> <p>PT. SUKSES MENTAYA ABADI PROPERTI (DIWAKILI OLEH SURYA DHARMA PUTRA SELAKU DIREKTUR) (T.II.INT I)</p> <p>PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (T.II.INT II)</p>
2	<p>38/G/2022/PTUN.PLK Jo. 45/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 45 K/TUN/2024 (PERTANAHAN)</p> <p>YAYASAN POKTAN BATU BULAN (DIWAKILI OLEH HODLAND DM, S.E., SELAKU KETUA)</p> <p>LAWAN</p> <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN</p> <p>PT. KARYA DEWI PUTRA (DIWAKILI OLEH BENHARD RIZAL SETYAWAN SELAKU DIREKTUR) (T.II.INT)</p>	YAYASAN POKTAN BATU BULAN (DIWAKILI OLEH HODLAND DM, S.E., SELAKU KETUA)	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN</p> <p>PT. KARYA DEWI PUTRA (DIWAKILI OLEH BENHARD RIZAL SETYAWAN SELAKU DIREKTUR) (T.II.INT)</p>
3	<p>2/G/2023/PTUN.PLK Jo. 59/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 125 K/TUN/2024 (PERTANAHAN)</p> <p>1. Hj. MUSRIFAH 2. Hj. HALIDAH</p> <p>LAWAN</p>	<p>1. Hj. MUSRIFAH 2. Hj. HALIDAH</p>	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>1. PARTINI 2. ANANG SUKERI 3. KRISTINNELIE 4. SRI HANDAYANI 5. NURHAYATI 6. SUTRISMAN</p>



NO	NO PERKARA & KLASIFIKASI PERKARA	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA 1. PARTINI 2. ANANG SUKERI 3. KRISTINNELIE 4. SRI HANDAYANI 5. NURHAYATI 6. SUTRISMAN 7. SYAHRANI 8. HARTONO JANAN 9. YANTO 10. SARDI EFENDI 11. JAKA APRIA TANANKU 12. ERNAWATIE (T.II.INT)		7. SYAHRANI 8. HARTONO JANAN 9. YANTO 10. SARDI EFENDI 11. JAKA APRIA TANANKU 12. ERNAWATIE (T.II.INT)
4	40/G/2022/PTUN.PLK Jo. 49/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 213 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) SAHIDAR BUNTIT SOEKAH LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (T.II.INT)	PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (T.II.INT)	SAHIDAR BUNTIT SOEKAH
5	6/G/TF/2023/PTUN.PLK Jo. 78/B/TF/2023/PT.TUN.BJM Jo. 196 K/TUN/TF/2024 (TINDAKAN FAKTUAL) PT. SINGA MULIA KENCANA (Diwakili oleh Drs. Ec. AA. GDE RAKA WIJA, M.Si., selaku DIREKTUR) LAWAN 1. KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PT. SINGA MULIA KENCANA (Diwakili oleh Drs. Ec. AA. GDE RAKA WIJA, M.Si., selaku DIREKTUR)	1. KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



NO	NO PERKARA & KLASIFIKASI PERKARA	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
6	10/G/2023/PTUN.PLK Jo. 94/B/2023/PT.TUN.BJM Jo. 368 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) LASA LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH (T.II.INT)	LASA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH (T.II.INT)
7	13/G/2023/PTUN.PLK Jo. 16/B/2024/PT.TUN.BJM Jo. 502 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) NIO HERMANTO LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDianto 10. SUMARDIONO 11. SUROSO 12. AHMAD FAUZI 13. FAJRINA RAMADAYANTI 14. KHOIRURROZIKI AHYA 15. IMRAN SETIAWAN 16. YAYAN KUSTIANA 17. IWAN ARIF Rianto 18. ABDURROHMAN 19. HILDA DAMAYANTI 20. HADRI ALI FADLY 21. SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)	NIO HERMANTO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (T.II.INT 1) 2. PANDANG SILALAH (T.II.INT 2) 3. ENY SURYANTI 4. IRAWAN HENRY 5. GUNAWAN HENRY 6. AFRIYANO SUGENG HARIADI 7. RACHEL BUDHIARTI 8. CHITRA DEWI 9. RUDianto 10. SUMARDIONO 11. SUROSO 12. AHMAD FAUZI 13. FAJRINA RAMADAYANTI 14. KHOIRURROZIKI AHYA 15. IMRAN SETIAWAN 16. YAYAN KUSTIANA 17. IWAN ARIF Rianto 18. ABDURROHMAN 19. HILDA DAMAYANTI 20. HADRI ALI FADLY 21. SUPRIADI (T.II.INT 3 s.d T.II.INT 21)

NO	NO PERKARA & KLASIFIKASI PERKARA	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
8	25/G/2023/PTUN.PLK Jo. 41/B/2024/PT.TUN.BJM Jo.801 K/TUN/2024 (PERTANAHAN) 1.TARMINSIH 2.RISWANDI 3.H. IRAWAN 4.MULIYADI LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)	1.TARMINSIH 2.RISWANDI 3.H. IRAWAN 4.MULIYADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR MARIATE NYAHAN T. UNTING (T.II.INT)

6. Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2024

Tabel 2.25 Keadaan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali tahun 2024

NO	PERKARA	JLH PERKARA PUTUS TH. 2024	CABUT	DISMISSAL	PERKARA YANG PUTUS TH. 2024 TIDAK MENGAJUKAN BANDING		PERKARA YANG PUTUS TH. 2024 TIDAK MENGAJUKAN KASASI		PERKARA YANG PUTUS TH. 2024 TIDAK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI	
					JLH	%	JLH	%	JLH	%
1	Pertanahan	10	2	-	6	50%	2	40,00%	7	100%
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perijinan	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	9	1	2	5	41,67%	7	87,50%	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	1	-	-	1	100%	-	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	1	-	-	1	100%	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	1	-	-	1	100	-	-	-	-

NO	PERKARA	JLH PERKARA PUTUS TH. 2024	CABUT	DISMISSAL	PERKARA YANG PUTUS TH. 2024 TIDAK MENGAJUKAN BANDING		PERKARA YANG PUTUS TH. 2024 TIDAK MENGAJUKAN KASASI		PERKARA YANG PUTUS TH. 2024 TIDAK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI	
					JLH	%	JLH	%	JLH	%
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Postitif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	3	-	-	1	33,33%	-	-	1	100%
17	Lain-Lain	1	1	1	3	100%	-	-	-	-
Jumlah		28	4	3	18	51,43%	9	52,94%	8	100%

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. POSBAKUM

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran sebesar Rp 42.310.000,00 selama 1 Tahun dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan untuk Layanan Pengamanan Sidang sebesar Rp 8.800.000,00 dan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp 33.000.000,00 dan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp 510.000,00. Realisasi anggaran ini pada tahun 2024 sebesar Rp 42.310.000,00 atau 100% dari pagu DIPA. Untuk Jasa Konsultan Hukum menggunakan Jasa Pos Bantuan Hukum (PBH) Peradi sebagai Konsultan Hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum dengan Target Layanan Bantuan Hukum Tahun 2024 sebesar 96 Orang (288 JML).

➤ **Laporan Pelaksanaan Posbakum Selama Tahun 2024**

Tabel 2.26 Laporan Pelaksanaan Posbakum selama tahun 2024

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
1	2	3	4	5	6	7
Januari	1	08-01-2024	Masbransyah	Jl. DR. Murjani GG. Suka Maju No. 15, RT.003, Pahandut, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	2	17-01-2024	Harianto	Desa Madara, RT/RW. 002/001, Madara Dusun Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	3	18-01-2024	Markopolo	Jl. Tani Makmur No. 28, RT/RW. 042/004, Buntok Selatan, Dusun Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah keputusan DEWAN Perwakilan Rakyat
	4	22-01-2024	Mansiani Lestari	Jl. Virgo 1 No. 49, RT/RW. 001/005, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah harta warisan
	5	25-01-2024	Kaji Kelana Usop	Jl. Yos Sudarso No. C1-1, RT/RW. 002/015, Palangka Raya , Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Hukum AHU pemalsuan data
	6	29-01-2024	Sutrisno	Jl. Bakti II No. 13, RT/RW. 001/003, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	7	30-01-2024	Yayang Silawati	Jl. Tingang XXIV, RT/RW. 005/003, Bukit Tunggul, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
Pebruari	8	05-02-2024	M. Rojim	Jalan Yos Sudarso, RT/RW. 003/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah surat tanah
	9	06-02-2024	Taburiansyah, S.E., M.M.	Jalan G. Obos Raya No. 117 C, RT/RW. 006/006, Menteng Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah gugatan
	10	07-02-2024	Suseni	Jalan Bakti II, RT/RW. 005/014, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah
	11	13-02-2024	Umar	Jalan Samratulang No. 39, RT/RW. 004/002, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah surat tanah
	12	19-02-2024	Etje, S.AG	Jalan Aries IV No. 04, RT/RW. 002/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	13	19-02-2024	Sally Angelina	Jalan Menteng X, RT/RW. 003/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah harta warisan
	14	19-02-2024	Muhammad Maki	Jalan Kalimantan, RT/RW. 003/017, Pahandut, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah gugatan sebagai tergugat II intervensi
	15	28-02-2024	Siti Norliana	Jalan Yos Sudarso, No. 97A, RT/RW. 001/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tanah
Maret	16	04-03-2024	Tenny, S.Sos	Jalan A. Yani KM. 4, RT/RW. 013/000, Tamiang Layang, Dusun Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
	17	06-03-2024	Yayan	Jalan Galinggang, RT/RW. 007/000, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tanah
	18	12-03-2024	Ahmat Juliadi	Jalan Galinggang, RT/RW. 003/002, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tanah
	19	12-03-2024	M. Pardi	Jalan RTA. Milono, RT/RW. 004/013, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tanah perumahan
	20	13-03-2024	Muhammad Maki	Jalan Kalimantan, RT/RW. 003/017, Pahandut, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah hukum HGU
	21	18-03-2024	Andrew Claudio F. Simamora	Jalan Yos Sudarso 3, RT/RW. 004/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah surat pernyataan tanah
	22	19-03-2024	Wilingli A. Dohong	Jalan Tjilik Riwut KM. 33, RT/RW. 004/001, Tangkiling, Bukit Batu	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	23	20-03-2024	Willy Talentaniko	Jalan Kenari 2 No. 02, RT/RW. 002/022, Palangka, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah hukum
	24	21-03-2024	Utuh Asmadi	Jalan Galinggang, RT/RW. 004/002, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah surat pernyataan tanah
	25	25-03-2024	Rangga H. Matali	Jalan Galinggang, RT/RW. 002/000, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah harta warisan
	26	27-03-2024	Romulus, S.H., M.H.	Jalan Ya'am Sabran Villa Elektrik Permai Blok D2/12, RT/RW. 002/011, Tanjung Hulu, Pontianak Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sertipikat tanah
April	27	02-04-2024	M. Zaini Mansyur	Jalan A. Yani Flamboyan Bawah, RT/RW. 006/008, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah
	28	03-04-2024	Wiwik Susilowati	Jalan G. Obos XII, RT/RW. 002/006, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Hak Waris
	29	17-04-2024	Supendi	Jalan Lintas, RT/RW. 014/000, Anjir, pulang Pisau, Kahayan Hilir	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah
	30	22-04-2024	Rahmawati	Jalan A. Yani VI Flamboyan, RT/RW. 004/008, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sengketa tanah
	31	25-04-2024	Fitrie Amelia	Jalan Soeprapto No. 21, RT/RW.068/007, Mentawa Baru Hilir, Mentawa baru, Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Gugatan terhadap SHM yang terbit diatas SKT milik orang lain
	32	25-04-2024	Syuhrah	Jalan Soeprapto No. 21, RT/RW.068/007, Mentawa Baru Hilir, Mentawa baru, Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Gugatan terhadap SHM yang terbit diatas SKT milik orang lain

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
	33	29-04-2024	Senie Turang, S.E.	Jalan Keruing No. 33 A, RT/RW. 002/003, Pancarung, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pembatalan jual beli perumahan
Mei	34	06-05-2024	Eyie Phirmansyah T.L.	Jalan Tilung I RT.01/RW.VIII, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah peralihan Hak Atas Tanah Pribadi
	35	08-05-2024	Awa Eva	Desa Pahawan Kab. Pulang Pisau, RT.002, Pahawan, Banama Tingang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Hak Penerima Atas Penyerahan Bidang Tanah
	36	14-05-2024	Yantie	Taman Kebun Jeruk 07/31 RT.004/RW.006, Jakarta Barat	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi gugatan atas perijinan Usaha Pertambangan yang telah berakhir
	37	21-05-2024	Freddy W.	Jalan A. Yani VI, Flamboyan, Rt/RW.004/008, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sengketa tanah
	38	24-05-2024	Dwi Agustia Wahyuni	Jalan Rajawali VII/77, RT.004/RW.003, Bukit Tunggal, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan terhadap SHM yang terbit diatas SKT milik orang lain
	39	27-05-2024	Regina	Jalan Manggis RT.058/RW.008, Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru, Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
	40	29-05-2024	Ucok Riyadi Simanjuntak, S.H.	Jalan Manggis V A RT.058/RW.008, Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru, Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pengajuan Gugatan terhadap SK Bupati Seruyan Prov. Kalimantan Tengah
Juni	41	05-06-2024	Brori Andreanto	Jalan Damang Nahan, RT.001/RW.000, Desa Mantangai Tengah, Kec, Mantangai, Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pemberhentian Perangkat Desa
	42	05-06-2024	Denianto	Jalan Damang Nahan, RT.001/RW.000, Desa Mantangai Tengah, Kec, Mantangai, Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengenai syarat-syarat pengajuan gugatan pemberhentian Perangkat Desa
	43	06-06-2024	Aruf Marko Silalahi, S.H.	Jalan Manunggal I, No.129, RT.013/RW.000, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab, Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan Gugatan atas tumpang tindih sertipikat
	44	10-06-2024	Yamani	Jalan Kapuas No. 59, RT.005/RW.002, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat. Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sengketa tumpang tindih

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
						alas hak atas tanah
	45	14-06-2024	Yupin Seth Incon	Jalan RTA. Milono, Km. 4,5 Perum Betang No. 57 A III, RT.004/RW.013, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah sengketa tanah yang tumpang tindih kepemilikannya
	46	19-06-2024	Ledelapril Awat, S.H.	Jalan Tinggang XXVII, No. 4, RT.005/RW.003, Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Penggunaan e-Court Pengajuan Gugatan di PTUN Palangka Raya
	47	20-06-2024	Heru Prasetya Hermanto	Jalan Ebony Golf I, No. 12 BGM, RT.009/RW.005, Kamal Muara Penjarangan Jakarta Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Pengajuan Gugatan terhadap Perijinan
	48	24-06-2024	Merry	Jalan Kapuas No. 59, RT.005/RW.002, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat. Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan Gugatan atas tumpang tindih sertipikat
Juli	49	01-07-2024	Drs.Edy Lukman Hakim, MM.	Jl.Pemuda Gg.V No.088 RT.011/RW. 000, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab.Kapuas.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan terhadap Bupati Kapuas
	50	03-07-2024	Deden Koswara	Kompl. Abdi Persada Blok Scorpio V RT.018/RW.002, Kel. Alalak Utara, Kec.Banjarmasin Utara, Kalsel.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Kordinasi menjadi saksi ahli di PTUN Palangka Raya
	51	04-07-2024	Ahmad Fauzi.	Jl. G.Obos XVI No.07A RT.011/RW.006 Kel.Menteng Kec. Jekan Raya P. Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi fakta perkara pertanahan tumpang tindih sertipikat
	52	04-07-2024	Gunawan, SE. M. Si.	Jl. G.Obos XVI No. 27, RT.011/RW.006, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, P. Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi fakta masalah sengketa tumpang tindih alas hak atas tanah
	53	08-07-2024	Yupin Seth Incon	Jl. XVI G.Obos No. 139, RT.008/RW.006, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, P. Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah sengketa tanah yang tumpang tindih kepemilikannya
	54	10-07-2024	Herdiana Walter Banden.	Jl. Rajawali VI Gg. II No. 1, RT. 002/RW. 003, Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah sengketa tanah yang tumpang tindih alas haknya
	55	11-07-2024	Odek NB. Nyabung	Jl. Katamso No. 42 RT 028, Kel. Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh, Barut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Pengajuan Gugatan terhadap

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
						Perijinan IUP batubara
	56	15-07-2024	Sai'in	Jalan Cut Mutia RT. 017/RW. 006, Kel. Sawahan, Kab. Kotim Sampit	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih kepemilikan lahan
	57	25-07-2024	Nitami Nurullita	Jalan Rajawali No. 031 C, RT 002/RW 003, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Penanganan Perkara di PTUN Palangka Raya guna memenuhi tugas akhir.
	58	29-07-2024	Ayau Ganja	Jalan Hiu Putih Lingkar Luar RT 13/RW 14 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih kepemilikan tanah
Agustus	59	05-08-2024	Yulianson	Jl. Kalimantan RT.001/RW. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultas tumpang tindih surat kepemilikan tanah
	60	07-08-2024	Yunadi	Jl. Pertamina RT.002 Desa karang Langit Kec.Dsun Timur Barito Timur.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Kordinasi menjadi saksi pilkades di PTUN Palangka Raya
	61	08-08-2024	Megawati	Desa Babai RT.004/RW.002 Desa Babai Kec..Karau Kuala Barito Selatan.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan dalam perkara di TUN
	62	08-08-2024	Yusi Nurdianti.	Jl. Paken No.06 RT.016/RW.004 Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab.Katingan.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai PNS untuk menjadi saksi Pilkades di Kab. Katingan
	63	12-08-2024	Riki Valentino.	Jl. Sanen Sa'al RT.016/RW.004 Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab.Katingan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk menjadi saksi Pilkades Kab. Katingan
	64	14-08-2024	Priswantomo Budi Prasetyo	Desa batu Badinding RT.001/RW.001 Kec. Katingan Tengah Kab.Katingan.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi Pilkades Desa untuk Desa Batu Badinding
	65	14-08-2024	Depri	Desa batu Badinding RT.001/RW.001 Kec. Katingan Tengah Kab.Katingan.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi Pilkades Desa untuk Desa Batu Badinding
	66	19-08-2024	Emit Pua Yuhang	Desa Karang Langit RT.003/RW.000 Kec. Dusun Timur Kab.Barito Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi Pilkades Desa untuk Desa Karang Langit
	67	20-08-2024	Sri Yeni.	Jl. Kalimantan Kel.Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi penyalahgunaan dana Desa di Kab. Gunung Mas sehubungan dengan Perkara

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
						di PTUN Palangka Raya.
	68	28-08-2024	Dr. Ampera Y. Mebas, SE.MM.	Jl. Patianom RT.005/RW.000 Kel.Tamiyang Layang Kec.Dusun Timur Kab.Barito Timur.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi Gugatan Pilkades di Barito Timur.
September	69	02-09-2024	Frengki Abriano	Jalan Langsung Blok KC. No. 52, RT.015/RE.004 Kel. Kasongan La,ma Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi dalam Pilkades di Katingan
	70	03-09-2024	Karya	Desa Tumbang Kalamei, RT.003/RW.001 Desa Tumbang Kalamei Kab. Katingan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk menjadi saksi Tergugat II Intervensi perkara Pilkades di Kasongan
	71	10-09-2024	Bahrudin	Jalan Jend. Sudirman Km. 18 RT.009/RW.003, Desa Pasir Putih, Ke. Mentawa Baru, Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengajukan gugatan hak atas tanah melawan Pemerintah Kab. Kotim
	72	11-09-2024	Ardianur	Jalan Iskandar 29, Rt.011/RW.003, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi dalam perkara Tindakan Faktual Melawan Bupati Kotim
	73	19-09-2024	Nuhranudin	Jalan Metro TV Sampit, RT.048/RW.004, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan Kelompok Tani melawan Bupati Kotim
	74	24-09-2024	Pella Rafila	Jalan Manjuhan, RT.006/RW.006, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi untuk Tergugat
	75	25-09-2024	Agus Winderman	Tumbang Talaken, RT.003/RW.001, Desa Tumbang Talaken, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Gugatan Kepegawaian
	76	26-09-2024	Nofriyanti, S.Pd.	Jalan Nenas RT.005/ RW.002, Desa Tampang Tumbang Anjir, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah harta peninggalan yang dikuasai sepihak
	77	26-09-2024	Yulita	Desa Petak Bahandang, RT.003/RW001, Petak Bahandang, Kec. Kurun	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah penyalahgunaan dana Desa di Kab. Gunung Mas
	78	30-09-2024	Mei Debri	Desa Karang Langit, RT.003/RW.000, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan Pilkades di Barito Timur



Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
Oktober	79	01-10-2024	Darwinson	Jalan G.Obos XV No. 87, RT.013/RW.006, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam rangka pengajuan Gugatan ke PTUN Palangkaraya
	80	02-10-2024	Suriyanto	Jalan Walter Condrad No.09 Sampit, RT.037/RW.008 Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan Gugatan Kelompok Tani
	81	03-10-2024	Hartani	Jalan Usman Harun 4 No. 45, RT.005/RW.003, Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengajukan gugatan hak atas tanah melawan Pemerintah Kab. Kotim
	82	07-10-2024	Wina Susanti	Jalan Ir. H. Juanda, RT.005/RW.002, Telaga Baru, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang Sampit	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan gugatan ke BKD Kotim atas mutasi suaminya
	83	10-10-2024	Haris Arif	Jalan. Muara G. Obos XII, RT.006/RW.006, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tapi belum dilaksanakan eksekusi
	84	15-10-2024	Murdani	Jalan Teratai 4 Timur Gg. Bersama 2, RT.002/RW.004, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru, Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih hak atas tanah
	85	17-10-2024	Ade Juliannor	Jalan Teratai No. 27, RT.026/RW.000, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan Gugatan Kepegawaian
	86	28-10-2024	Egeng Hareman	Jalan Krisna No. 04, RT.007/ RW.006, Ke. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pengembalian tata batas tanah
November	87	05-11-2024	Bineka Remala, SPd.	Desa Karali, RT. 003/RW. 000 Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Untuk Mengajukan Gugatan terhadap SK Pensiun yang berbeda dengan Golongan/Ruang Jabatan terakhir.
	88	11-11-2024	Bidu, ST. MT.	Jalan Putri Junjung Buih II No. 19 RT. 003/ RW.. 012 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan Gugatan Sengketa Pertanahan.
	89	14-11-2024	Mei Inawati	Jalan Adonis Samad No. 03 RT. 002/RW. 010 Kel. Panarung Kec.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengajukan gugatan atas

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
				Pahandut Kota Palangka Raya		terbitnya Sertipikat Hak di atas tanah yang dikuasai pihak lain.
	90	18-11-2024	Aji Santoso	Jalan Sepakat VII No. 70 Bangas Permai RT. 003/ RW. 010 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengenai Objek Perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara.
	91	19-11-2024	Al Hamdani	Jalan Pangeran Sukarma RT. 012/RW. 004 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Mengenai perkara TUN sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan magang.
	92	19-11-2024	Jayu Wanda	Jalan Tampung Penyang Perum. Kauzar Residen Blok D No. 8 Kel. Mentang Kec. Jekan Raya, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih hak atas tanah yang sudah bersertipikat.
	93	21-11-2024	Abdul Latif	Harusan RT. 003/RW. 002 Desa Harusan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam rangka program magang Mahasiswa di PTUN Palangkaraya.
	94	21-11-2024	Muhamad Gilang Maulana	Jalan Beliang Mas No. 04 RT. 004/RW. 022 Kel. Palangka. Kec. Jekan Raya, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam rangka program magang Mahasiswa di PTUN Palangkaraya.
	95	21-11-2024	Almas Jaitun	Jalan PerW.ira RT. 005/RW. 002 Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan Kab. Kobar	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam rangka program magang Mahasiswa di PTUN Palangkaraya.
	96	26-11-2024	Ucok Riyadi Simanjuntak	Jalan Manggis No. 5A RT. 058/RW. 008 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kotim.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Upaya Hukum atas Putusan No. 4/G/2024/PT. TUN/BJM Tanggal 31 Oktober 2024.
Desember	97	02-12-2024	Asyari	Gg. Kelapa No. 35 RT.042/RW.005 Kec. Mentawa Baru, Kepatang, Kab. Kotim, Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan sengketa Pilkades di Kabupaten Kotim
	98	05-12-2024	Budianto	Jalan Jendral Sudirman KM 36 RT.003/RW001 Desa Penyang Kec. Telawang Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan Gugatan Sengketa Pilkada di Desa

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
						Penyang Kab. Kotim
	99	05-12-2024	Hendrianto	Jalan Jendral Sudirman KM 36 RT.003/RW001 Desa Penyang Kec. Telawang Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi dalam gugatan Sengketa Pilkada di Desa Penyang Kab. Kotim
	100	11-12-2024	Edwar Manuah	Jalan Barito Raya No. 03 RT. 044/RW.004 Kel. Buntok Lota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam proses Dismisal Sebagai calon Tergugat II Intervensi
	101	19-12-2024	Kristian	Jalan G. Obos XXV Perum Victoria Blok D No. 5 RT. 007/RW. 005 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangka Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai Saksi atas Gugatan Sengketa Pertanahan.

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar tempat kedudukan gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun secara insidentil. Sidang keliling secara tetap adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun sesuai dengan program kerja yang tercantum dalam DIPA. Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum memiliki program Sidang Keliling.

3. PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PERKARA PRODEO)

Didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran untuk Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp 510.000,00 untuk 1 Perkara melalui Kegiatan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara untuk Perkara Prodeo. Dikarenakan tidak ada pelaksanaan perkara prodeo sampai dengan Bulan Oktober 2024, sehingga anggaran tersebut dialihkan ke anggaran pengamanan sidang, dan pagu anggaran ini telah terserap 100%.



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024 berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

Jumlah pegawai (Hakim dan PNS) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sampai dengan akhir Tahun 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Rincian Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai :

• Golongan I	:	0 orang
• Golongan II	:	0 orang
• Golongan III	:	13 orang
• Golongan IV	:	4 orang
Jumlah Total	:	17 orang

b. Jumlah Tenaga Teknis Hakim dan Non Hakim

• Ketua	:	1 orang
• Wakil Ketua	:	1 orang
• Hakim	:	3 orang
• Panitera	:	1 orang
• Panitera Muda Hukum	:	1 orang
• Panitera Muda Perkara	:	1 orang
• Panitera Pengganti	:	2 orang
• Juru Sita Pengganti	:	0 orang
Jumlah Total	:	10 orang

c. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

• Sekretaris	:	1 orang
• Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	:	1 orang
• Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	:	1 orang
• Pranata Komputer Ahli Pertama	:	1 orang
• Pelaksana	:	3 orang
Jumlah Total	:	7 orang



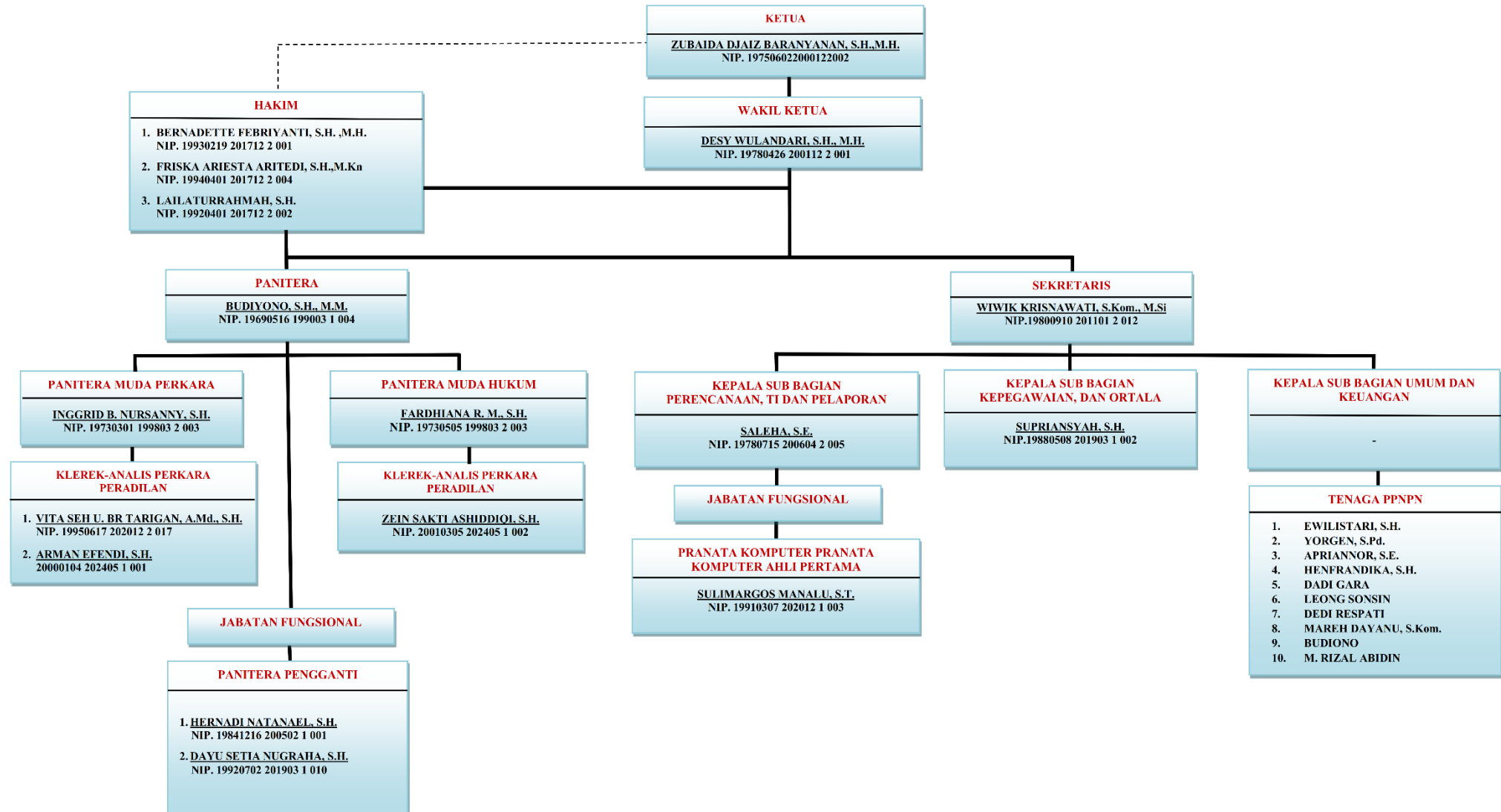
d. Jumlah Pegawai termasuk Hakim berdasarkan tingkat pendidikan

• Magister (S2)	:	6 orang
• Sarjana (S-1)	:	11 orang
Jumlah Total	:	17 orang

e. Jumlah Tenaga PPNP


• Supir	:	2 orang
• Satpam	:	4 orang
• Pramubakti	:	4 orang
Jumlah Total	:	10 orang

❖ **Struktur Organisasi**



❖ **Profil Sumber Daya Manusia**

Tabel 3.1 Tenaga Teknis Hakim

TENAGA TEKNIS HAKIM		
1		Nama : ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.
		NIP : 197506022000122002
		Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
		Jabatan : Ketua/Hakim Madya Utama
2		Nama : DESY WULANDARI, S.H., M.H.
		NIP : 197804262001122001
		Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/b)
		Jabatan : Wakil Ketua/Hakim Madya Muda
3		Nama : LAILATURRAHMAH, S.H.
		NIP : 199204012017122002
		Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
		Jabatan : Hakim Pratama Muda
4		Nama : FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.
		NIP : 199404012017122004
		Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
		Jabatan : Hakim Pratama Muda
5		Nama : BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.
		NIP : 199302192017122001
		Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
		Jabatan : Hakim Pratama Muda

Tabel 3.2 Tenaga Teknis Kepaniteraan

TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN			
1		Nama	: BUDIYONO, S.H., M.M.
		NIP	: 196804241990032003
		Pangkat/Golongan	: Pembina (IV/a)
		Jabatan	: Panitera
2		Nama	: INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
		NIP	: 197303011998032003
		Pangkat/Golongan	: Penata TK I (III/d)
		Jabatan	: Panitera Muda Perkara
3		Nama	: FARDHIANA RESDHIANTI MUDIJANINGRUM, S.H.
		NIP	: 197305051998032003
		Pangkat/Golongan	: Penata TK I (III/d)
		Jabatan	: Panitera Muda Hukum
4		Nama	: HERNADI NATANAEL, S.H.
		NIP	: 198412162005021001
		Pangkat/Golongan	: Penata TK I (III/d)
		Jabatan	: Panitera Pengganti
5		Nama	: DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
		NIP	: 199207022019031010
		Pangkat/Golongan	: Penata Muda TK. I (III/b)
		Jabatan	: Jurusita Pengganti

Tabel 3.3 Pejabat Struktural dan Fungsional

PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL			
1		Nama	: WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
		NIP	: 19800910 201101 2012
		Pangkat/Golongan	: Pembina (IV/a)
		Jabatan	: Sekretaris
2		Nama	: SALEHA, S.E
		NIP	: 19780715200604 2005
		Pangkat/Golongan	: Penata TK. I (III/d)
		Jabatan	: Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
3		Nama	: SUPRIANSYAH, S.H.
		NIP	: 19880508 201903 1 002
		Pangkat/Golongan	: Penata Muda TK.I (III/b)
		Jabatan	: Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4		Nama	: SULIMARGOS MANALU, S.T.
		NIP	: 19910307 202012 1 003
		Pangkat/Golongan	: Penata Muda (III/a)
		Jabatan	: Pranata Komputer Ahli Pertama

Tabel 3.4 Tenaga Non Teknis (Pelaksana)

TENAGA NON TEKNIS (PELAKSANA)			
1		Nama	: VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md., S.H.
		NIP	: 199506172020122017
		Pangkat/Golongan	: Penata Muda (III/a)
		Jabatan	: Klerek - Analis Perkara Peradilan
5		Nama	: ARMAN EFENDI, S.H.
		NIP	: 200001042024051001
		Pangkat/Golongan	: Penata Muda (III/a)
		Jabatan	: Klerek - Analis Perkara Peradilan
6		Nama	: ZEIN SAKTI ASHIDDIQI, S.H.
		NIP	: 200103052024051002
		Pangkat/Golongan	: Penata Muda (III/a)
		Jabatan	: Klerek - Analis Perkara Peradilan

Tabel 3.5 Tenaga PPNPN

TENAGA NON TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)		
1		Nama : EWILISTARI, S.H.
		Jabatan : Pramubakti / diperbantukan di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
2		Nama : YORGEN, S.Pd.
		Jabatan : Satpam/diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
3		Nama : HENFRANDIKA., S.H
		Jabatan : Pramubakti / diperbantukan di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4		Nama : APRIANNOR, S.E.
		Jabatan : Pramubakti / diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Perkara
5		Nama : DADY GARA
		Jabatan : Sopir / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan/PTSP
6		Nama : LEONG SONSIN
		Jabatan : Satpam / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan

7		Nama : DEDI RESPATI
		Jabatan : Pramubakti / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan /PTSP
8		Nama : MAREH DAYANU, S.Kom.
		Jabatan : Sopir / diperbantukan di Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
9		Nama : BUDIONO
		Jabatan : Satpam / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
10		Nama : M. RIZAL ABIDIN
		Jabatan : Satpam / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan

B. Mutasi

Pada Tahun 2024 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdapat Mutasi Keluar dan Mutasi Masuk:

1. Mutasi Keluar

- Berdasarkan Surat Keputusan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut :
 - **RIRI LASTIAR SITUMORANG, S.H.** NIP. 19940405202203011 Jabatan Klerek-Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melaksanakan tugas di tempat yang baru tanggal 5 Februari 2024 sebagai Calon Hakim Magang Pengadilan Negeri Palangkaraya.

- Berdasarkan Surat Keputusan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **NAVANYA GABRIEL CUACA, S.H.** NIP. 199810052022032010 Jabatan Klerek-Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melaksanakan tugas di tempat yang baru tanggal 5 Februari 2024 sebagai Calon Hakim Magang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **SEKAR ANNISA, S.H.** NIP. 199411092017122003 Jabatan Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mutasi pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagai Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.** NIP. 199404302017122006 Jabatan Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mutasi pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagai Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.** NIP. 197904132002122004 Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mutasi pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.** NIP. 197609252001121003 Jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mutasi pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 206/DJMT/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama:
 - **ADITYA APRIZA, S.H.** NIP. 198404222009041004 Jabatan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mutasi pada tanggal 9 Desember 2024 sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 206/DJMT/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama:
 - **RUSMINI SIAGIAN, S.H.** NIP. 196804241990032003 Jabatan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mutasi pada tanggal 16 Desember 2024 sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

2. Mutasi Masuk

- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut
 - **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.H.** NIP. 199404012017122004 Jabatan Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mulai melaksanakan tugas pada tanggal 1 Agustus 2024 sebagai Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** NIP. 199302192017122001 Jabatan Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mulai melaksanakan tugas pada tanggal 2 Agustus 2024 sebagai Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **LAILATURRAHMAH, S.H.** NIP. 199204012017122002 Jabatan Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mulai melaksanakan

tugas pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagai Hakim Pratama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **DESY WULANDARI, S.H., M.H.** NIP. 197804262001122001 Jabatan Hakim Madya Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mulai melaksanakan tugas tanggal 9 Agustus 2024 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.** NIP. 197506022000122002 Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mulai melaksanakan tugas tanggal 14 Agustus 2024 sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

C. Pelantikan

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2817/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 29 April 2024 Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya atas nama :
 - **SUPRIANSYAH, S.H.** NIP. 198805082019031002 Jabatan Operator-Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 16 Mei 2024.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 97/DJMT/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama :
 - **DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.** NIP. 199207022019031010 Jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 18 Juli 2024.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut :

- **DESY WULANDARI, S.H., M.H.** NIP. 197804262001122001 Jabatan Hakim Madya Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mulai melaksanakan tugas tanggal 9 Agustus 2024 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 206/DJMT/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama:
 - **BUDIYONO, S.H., M.M.** NIP. 196905161990031004 Jabatan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 13 Desember 2024.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 206/DJMT/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama:
 - **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.** NIP. 197303011998032003 Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan menjadi Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 13 Desember 2024.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 206/DJMT/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama:
 - **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.** NIP. 197305051998032003 Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 13 Desember 2024.

D. Pengangkatan CPNS

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2486/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama:
 - **ARMAN EFENDI, S.H.** NIP. 200001042024051001 Jabatan Klerek-Analis Perkara Peradilan, melaksanakan tugas sebagai CPNS pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 2 Mei 2024.

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2491/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024 tanggal 25 April 2024 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama:
 - **ZEIN SAKTI ASHIDDIQI, S.H.** NIP. 200103052024051002 Jabatan Klerek-Analis Perkara Peradilan, melaksanakan tugas sebagai CPNS pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 30 Mei 2024..

E. Promosi

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2817/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 29 April 2024 Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya atas nama :
 - **SUPRIANSYAH, S.H.** NIP. 198805082019031002 Jabatan Operator-Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dipromosikan dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 16 Mei 2024.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:
 - **DESY WULANDARI, S.H., M.H.** NIP. 197804262001122001 Jabatan Hakim Madya Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mulai melaksanakan tugas tanggal 9 Agustus 2024
- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 155/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut :
 - **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.** NIP. 197506022000122002 Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mulai melaksanakan tugas tanggal 14 Agustus 2024
- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 97/DJMT/SK.KP4.1.3/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama :
 - **DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.** NIP. 199207022019031010 Jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dipromosikan dalam Jabatan menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 18 Juli 2024.

- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 206/DJMT/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama :
 - **BUDIYONO, S.H., M.M.** NIP. 196905161990031004 Jabatan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dipromosikan sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mulai melaksanakan tugas tanggal 13 Desember 2024.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 206/DJMT/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama:
 - **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.** NIP. 197303011998032003 Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dipromosikan sebagai Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mulai melaksanakan tugas tanggal 13 Desember 2024.
- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 206/DJMT/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan/atau Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atas nama:
 - **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.** NIP. 197305051998032003 Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dipromosikan sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mulai melaksanakan tugas tanggal 13 Desember 2024.

F. Pensiun

Tidak ada Pegawai dan Hakim yang Pensiun di Tahun 2024

G. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM Teknis/ Non Teknis

Terdapat 5 (lima) orang Hakim dan 7 (tujuh) orang Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Teknis / Non Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Diklat SDM

No	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
1	Sekar Annisa, S.H.	232/KPTUN.W6-TUN4/ST.KP7.1/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024	Bimtek Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN
2	▪ Rusmini Siagian, S.H. ▪ Aditya Apriza, S.H.	307/KPTUN.W6-TUN4/ST.KP7.1/III/2024 Tanggal 4 Maret 2024	Bimtek untuk tenaga teknis Tahun Anggaran 2024 Wilayah PT.TUN Banjarmasin

No	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
3	Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si.	372/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/IV/2024 Tanggal 4 April 2024	Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
4	Rusmini Siagian, S.H.	371/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/IV/2024 Tanggal 4 April 2024	Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
5	Indah Mayasari, S.H., M.H.	454/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024	Bimtek Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN
6	Aditya Apriza, S.H.	453/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024	Bimtek Upaya Hukum secara Elektronik bagi Panitera Muda Perkara di Peradilan TUN Tahun Anggaran 2024
7	▪ Sulimargos Manalu, S.T. ▪ Dedi Respati	516/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/VI/2024 Tanggal 11 Juni 2024	Bimtek Penggunaan SIMAN v2
8	Muhamad Ilham, S.H., M.H.	529/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024	Bimtek Pendalaman Gugatan Melalui Citizen Law Suit (CLS), Class Action dan Legal Standing bagi Hakim Lingkungan Peradilan TUN secara daring
9	Hernadi Natanael, S.H.	582/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024	Bimtek Penyusunan Berita Acara Persidangan bagi Panitera Pengganti Pengadilan TUN Tahun Anggaran 2024 secara daring
10	Maryam Nur Hidayati, S.H.	602/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Bimtek Sengketa Pengesahan Badan Hukum bagi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN
11	Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H.	739/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/IX/2024 Tanggal 13 September 2024	Bimtek dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI
12	▪ Saleha, S.E ▪ Sulimargos Manalu, S.T.	885/KPTUN.W6- TUN4/ST.KP7.1/XI/2024 Tanggal 12 November 2024	Bimtek Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

RUANG TUNGGU



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 seperti :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
8. DIPA BUA Tahun Anggaran 2024 No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tanggal 24 November 2023 dan DIPA Ditjen Badilmiltun Tahun Anggaran 2024 No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tanggal 24 November 2023;
9. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui DIPA Tahun 2024 No. DIPA-005.01.2.578843/2024 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tanggal 28 November 2023 mempunyai 3 (tiga) program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti:

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA).

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan :

- ❖ Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) dengan keluaran :
 - Layanan Perkantoran (6986.EBA.994) dengan sub keluaran :
 - Gaji dan Tunjangan (001)
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
 - Layanan Umum (1066.EBA.962) dengan sub keluaran :
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah (051)
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :
 - Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (052)

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :

- Koordinasi (1059.AEA.003) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051).
- Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran :
 - Pos Bantuan Hukum (051)
- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059. BCA.001) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui **DIPA BUA Tahun 2024 No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tanggal 28 November 2023** dengan nilai pagu awal Rp 4.770.170.000,00 mengalami revisi DIPA sebanyak 11 kali, Sedangkan untuk **DIPA Ditjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tanggal 28 November 2023 dengan nilai pagu Rp 42.310.000,00** mengalami revisi DIPA sebanyak 4 kali.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2023 tanggal 28 November 2023 sampai pada Revisi ke-11 dan DIPA Ditjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2024 tanggal 28 November 2023 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dengan pagu DIPA sebesar Rp 4.172.444.000,00

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan:

- ❖ Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) dengan keluaran:
 - Layanan Perkantoran (6986.EBA.994) dengan sub keluaran:
 - Gaji dan Tunjangan (001) dengan pagu DIPA sebesar Rp 2.715.266.000,00
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan pagu DIPA sebesar Rp 1.427.178.000,00
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :
 - Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (052) dengan pagu DIPA sebesar Rp 30.000.000,00
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF) dengan pagu DIPA sebesar Rp 42.310.000,00.
- Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :
- Koordinasi (1059.AEA.003) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp 8.800.000,00
 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran :
 - Pos Bantuan Hukum (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp 33.000.000,00
 - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059. BCA.001) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp 510.000,00

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari kantor seperti Belanja Keperluan

Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.

3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadailan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2024 No. DIPA-005.01.2.578843/2024 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tanggal 28 November 2023 dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan jumlah sampai saat ini 27 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 revisi ke 11 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.715.266.000,00. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2024 telah menyerap dana sebesar **Rp 2.529.454.360,00** dan Pengembalian sebesar Rp 0,00 sehingga terjadi realisasi di bawah anggaran sebesar Rp 185.811.640,00 atau sebesar **93,16%** dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.522.178.000,00. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama Tahun Anggaran 2024 telah menyerap dana DIPA BUA sebesar **Rp 1.519.569.079,00** dan Pengembalian sebesar Rp 0,00 sehingga terjadi realisasi di bawah anggaran sebesar Rp 2.608.921,00 atau sebesar **99,83%** dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri:

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp 670.217.701,00 atau 99,98% yang terdiri dari belanja:

- Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp 447.942.000,00 atau 99,97% dari pagu DIPA.
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp 4.164.000,00 atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp 37.752.000,00 atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp 589.250,00 atau 73,66% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp 75.497.000,00 atau 100,00% terdiri dari belanja:
 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp 75.497.000,00 atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp 211.398.267,00 atau 99,80% terdiri dari belanja:
 - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp 596.896,00 atau 84,31% dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Air terserap sebesar Rp 3.174.670,00 atau 92,18% dari pagu DIPA.
 - Belanja Sewa sebesar Rp 3.500.000,00 atau sebesar 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Jasa Lainnya Sebesar Rp 1.600.000,00 atau 100% dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp 586.187.837,00 atau 99,74% terdiri dari belanja:
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp 353.513.700,00 atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp 33.931.150,00 atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp 198.742.987,00 atau 99,26% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp 136.289.725,00 atau 99,75% terdiri dari belanja:
 - Belanja Perjalanan Biasa terserap sebesar Rp 135.729.725,00 atau 99,75% dari pagu DIPA.

- Belanja Perjalanan Dalam Kota sebesar Rp 560.000,00 atau 100% dari pagu DIPA

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 42.310.000,00, realisasi anggaran Rp 42.310.000,00 atau 100% dari pagu DIPA.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tahun Anggaran 2024 terdapat anggaran belanja modal dengan pagu DIPA sebesar **Rp30.000.000,00** dengan realisasi **Rp 30.000.000,00** atau **100%** dari pagu DIPA.

Tabel 4.1 Daftar Realisasi Anggaran 2 DIPA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Bel. Pegawai (01)	2.715.266.000,00	2.529.639.898,00	185.628.102,00	93,16
2	Bel. Barang (01)	1.522.178.000,00	1.519.569.079,00	2.608.921,00	99,98
	Bel. Barang (05)	42.310.000,00	42.310.000,00	0,00	100
3	Bel. Modal (01)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100
Jumlah Belanja		4.309.754.000,00	4.121.518.977,00	188.235.023,00	95,64

Tabel 4.2 Daftar Realisasi PNBP 2 DIPA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	15.543.000,00	11.220.742,00	(4.322.258)	72,19
2.	DIPA 05	12.236.000,00	12.087.000,00	(149.000)	98,78
Jumlah		27.779.000,00	23.307.742,00	(4.471.258,00)	83,91

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Adapun sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain adalah :

1. Sarana dan Prasarana Kantor

Pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari :

- 1 buah gedung pengadilan yang berukuran luas 1.029 M².
- 7 buah rumah dinas Hakim yang terdiri dari : 2 buah rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua, dan 6 buah rumah dinas jabatan (Hakim).
- 3 buah Mobil Dinas yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- 9 buah Sepeda Motor yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

a) Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2024 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tanggal 28 November 2024 sampai revisi 11 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

– Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa:

- Pengadaan Laptop Rp 30.000.000,00

b) Pemeliharaan.

- Gedung-Bangunan dan Halaman Rp 387.444.850,00
serta Rumah Dinas
- Kendaraan Roda 4 Rp 102.788.987,00
- Kendaraan Roda 2 Rp 30.916.000,00
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 65.038.000,00
- Langganan Daya Dan Jasa Rp 211.398.267,00

c) Penghapusan

Penghapusan untuk Tahun 2024 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak ada mengusulkan penghapusan.

I. Daftar Inventaris Per 31 Desember 2024 berupa :

Bangunan

Bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dibangun berdasarkan DIP Nomor : 063/XIII/3/-/1995, tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya Rp 443.200.000,00 dan dikelola sendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

II. Denah bangunan / gedung disertai keterangan adalah :

- Ruang Ketua
Ukuran = 9 x 4 = 36 M²
Jumlah Hakim = 1 Orang

- Ruang Wakil Ketua
Ukuran = $9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$.
Jumlah Hakim = 1 Orang
- Ruang Hakim
Ukuran = $13,5 \times 6 = 81 \text{ M}^2$.
Jumlah Hakim = 3 Orang
- Ruang Panitera
Ukuran = $3,5 \times 6,4 = 22,4 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Ukuran = $4,5 \times 5 = 22,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 2 Orang
- Ruang Server
Ukuran = $4,5 \times 5 = 22,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = - Orang
- Ruang Kepaniteraan Muda Perkara
Ukuran = $67,5 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 5 Orang
- Ruang Kepaniteraan Muda Hukum
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
- Ruang Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
- Ruang Bagian Umum dan Keuangan
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 2 Orang
- Ruang Berkas Perkara
Ukuran = $5,89 \times 3,88 = 22,8 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = - Orang
- Ruang Pemeriksaan Persiapan dan *Media Center*
Ukuran = $14 \times 6 = 84 \text{ M}^2$.
- Ruang Sidang Utama
Ukuran = $15 \times 10 = 150 \text{ M}^2$.

Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 063/XIII/3/-/1995 tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp 443.200.000,00

Bangunan Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 051/XIII/3/-/1996 tanggal 30 Maret 1996 Tahun Anggaran 1996/1997 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp 206.700.000,00

Pada tahun 2004 dibangun 2 unit Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasarkan DIP Nomor : 085/XIII/14/-/2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan biaya Rp 221.464.000,00

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Khusus terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, berdasarkan anggaran yang tersedia dari DIPA Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan pengadaan sebagai berikut :

a) Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2024 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tanggal 28 November 2024 sampai revisi 11 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

– Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa:

- Pengadaan Laptop Rp 30.000.000,00

b) Pemeliharaan.

- Gedung-Bangunan dan Halaman Rp 387.444.850,00
serta Rumah Dinas
- Kendaraan Roda 4 Rp 102.788.987,00
- Kendaraan Roda 2 Rp 30.916.000,00
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 65.038.000,00
- Langganan Daya Dan Jasa Rp 211.398.267,00

c) Penghapusan

Penghapusan untuk Tahun 2024 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak ada mengusulkan penghapusan.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-Court di PTUN Palangkaraya

Pada tahun 2018 merupakan momentum peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pada tanggal 10 Desember 2018 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Secara Elektronik di Pengadilan dan telah dicabut dan perbaharui terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan tersebut terkait

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara peradilan/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Administrasi perkara secara elektronik atau yang disebut *E-Court* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Perkara secara online (*E-Filling*).
- b. Pembayaran biaya perkara secara online (*E-Payment*).
- c. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Jawaban).
- d. Pemanggilan secara *online* (*E-Summon*).
- e. Penyampaian salinan putusan secara online.

Manfaat penggunaan aplikasi e-court dalam pendaftaran perkara secara online adalah sebagai berikut :

1. Mampu menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran panjar biaya dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi/media
4. Proses temu kembali data dengan lebih cepat.

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mewajibkan pendaftaran gugatan melalui Aplikasi E-Court. Adapun jumlah perkara yang masuk melalui aplikasi E-Court :

- Pada Tahun 2020 sebanyak 34 Perkara (30 perkara, 2 FP dan 1 KI)
- Pada Tahun 2021 sebanyak 39 Perkara (31 perkara, 3 FP dan 5 KI)
- Pada Tahun 2022 sebanyak 42 Perkara (40 perkara, 1 KI dan 1 TF)
- Pada Tahun 2023 sebanyak 31 Perkara (23 perkara, 1 KI, 4 TF dan 3 SPPU)
- Pada Tahun 2024 sebanyak 27 Perkara (25 Perkara, 2 TF)

2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di PTUN Palangkaraya

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah salah satu aplikasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya khususnya informasi perkara dan persidangan. Berikut adalah perangkat keras yang telah tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mendukung Teknologi Informasi khususnya SIPP:

a. Perlengkapan Server

Tabel 4.3 Perlengkapan server

No.	Perangkat	Ruang	Ket
1	Modem Iconplus	Server	Rack System
2	Mikrotik Routerboard 1100AHX2		
3	UPS APC Smart UPS 3000		
4	Server Fujitsu Primergy RX1330 M1(Server SIPP)		
5	Switch Hub D-Link 10/100 switch Des 1016 D		
6	Rak Server		
7	UPS Smart UPS SRT 2200		Rack System
8	Server Fujitsu Primergy 1X1330M4		
9	Rack Server Indo rack		
10	PC dan CPU Inspur		
11	Printer Canon MX 497		
12	Wireless Acces Point	Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang Pemeriksaan Persiapan, Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Panitera, Ruang Panitera Muda Perkara, Ruang Umum dan Keuangan, Ruang PTIP, Ruang Lorong Kepaniteraan, Lobby PTSP, Ruang Tunggu, Ruang Operator dan Pos Satpam	

b. Perangkat PC, Laptop dan lain-lain sebagai Client Pengguna SIPP

Tabel 4.4 Perangkat komputer pengguna SIPP

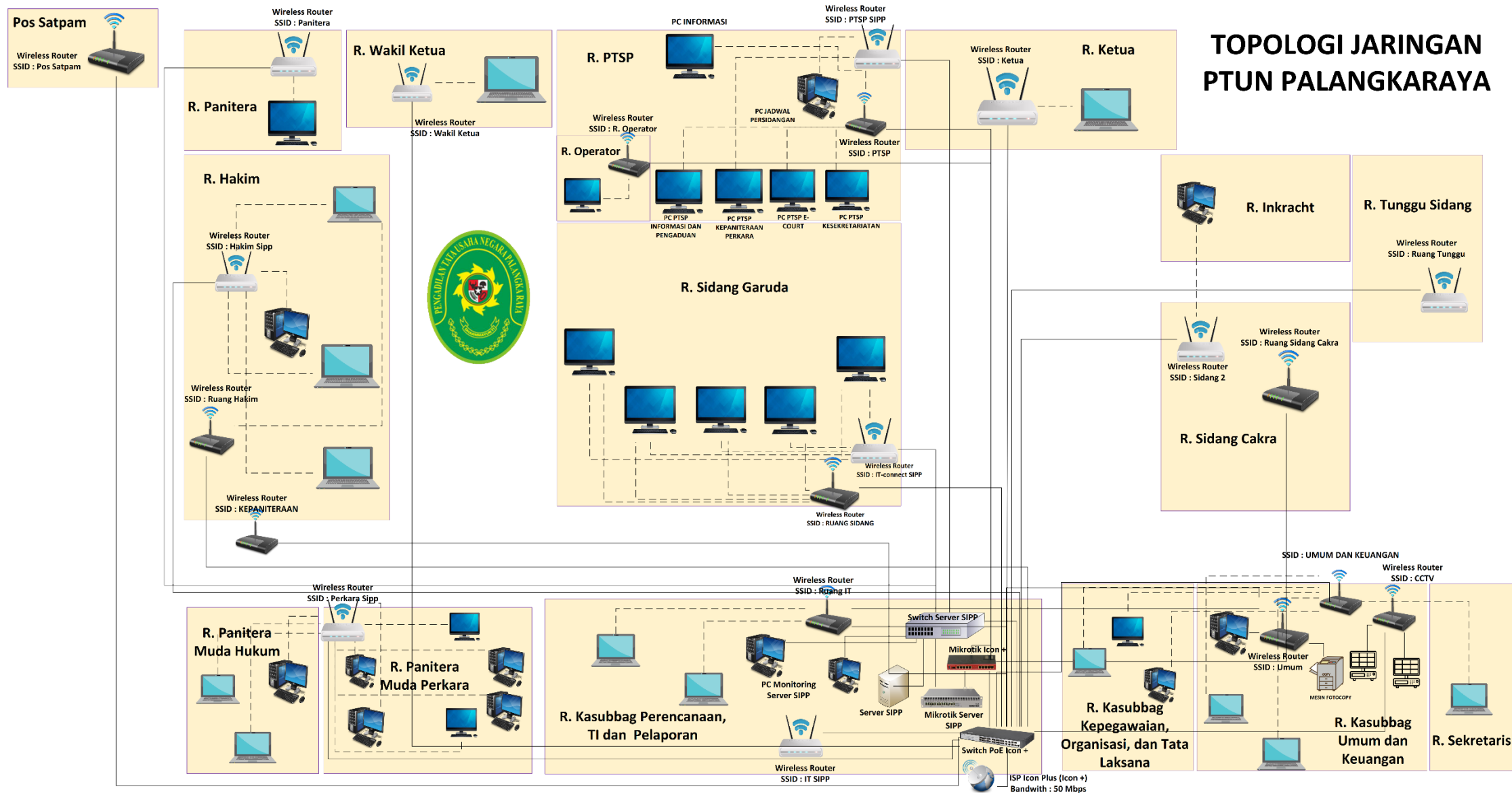
No	Perangkat	Ruang
1	Laptop Fujitsu Lifebook E448	Ketua
2	Laptop Fujitsu Lifebook E448	Wakil Ketua
	Printer Canon PIXMA IP 2770	
3	PC Acer dan CPU Acer Intel Core i3	PTSP
	PC HP Intel Core i5	
	PC HP Intel Core i5	
	PC HP Intel Core i5	

No	Perangkat	Ruang
	UPS APC 700 watts	
	UPS APC 700 watts	
	UPS APC 700 watts	
	Scanner Fujitsu fi-8150U	
	Printer All in One Canon G4010	
4	PC dan CPU Lenovo Intel Core i5	Hakim
	Printer PIXMA G4010	
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Laptop axioo Intel Core i3	
5	PC dan CPU Lenovo Intel Core i5	Panitera
	Printer Canon 62000	
6	PC Acer Intel Xeon 2.00 GB	Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan
	Laptop axioo Intel Core i3	
	CPU HP. Proliant ML 350	
	UPS ICA CE 1200	
	Printer PIXMA Canon G4010	
7	PC Intel Core i5	Panitera Muda Perkara
	PC Desktop Intel Core i5	
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Voice Recorder Sony 3 Unit	
	Printer Canon PIXMA IP 2770	
	PC HP Intel Core 5	
	PC Desktop Intel Core i5 (new 2021)	
	Scanner Fujitsu SP 1130	
8	PC Desktop Intel Core i5 (new 2021)	Panitera Muda Hukum
	Scanner Brother ADS – 1700 W	
	Printer Canon Pixma G2010 (2 Unit)	
	Laptop Lenovo Core I3	
9	PC dan CPU Acer Intel Core i3 (2 Unit)	Panitera Pengganti
	Printer Canon PIXMA G1000	
	Printer HP Laser Jet Pro 4003 dw	
10	PC Acer Intel Core I5	Kasir
	Printer Canon PIXMA G2000	
11	PC Lenovo	Meja Informasi
12	Vestouch Interactive Android Kiosk21,5	Pendukung E-Court
13	PC Samsung dan CPU Lenovo Intel Core i5	Lobby
14	PC Desktop Core i5 ACER	Ruang Sidang Utama
	PC Desktop Core i5 ACER	
	PC Desktop Core i5 ACER	
	Speaker YAMAHA DBR 12	
	Webcam Teleconference Logitech	
	Microphone Wireless Hardwell	
	Audio Mixer BEHRINGER	
	UPS Prolink 5 Unit	

c. Infrastruktur *Local Area Network* pendukung SIPP

Dalam upaya meningkatkan kecepatan akses terhadap Aplikasi SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, sinkronisasi data SIPP Lokal dengan SIPP Mahkamah Agung, sinkronisasi data SIPP Lokal dengan SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dan Sinkronisasi data SIPP Lokal dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung pada pelaksanaan *upload* putusan ataupun *e-document* upaya hukum. *Bandwidth* internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tahun 2024 sebesar 80 Mbps dengan *Provider* Icon+ (14 Access Point).

Adapun Topologi Jaringan Internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah sebagai berikut :





BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance Excellent-ICPE*). Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2015.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

Pada Tahun 2018, Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mendapatkan Nilai C “Cukup” dengan skor 76,87 berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TAPM 13-TUN/QMR/SERTIFIKAT/V/2018.

Pada tahun 2019, Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya meraih Nilai A “Excellent” dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TAPM.16-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2019 dengan skor 90,40

Pada tahun 2021 Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Nilai **A “Excellent”** kembali dipertahankan dengan nilai 92,07 berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: TSAPM.4.TUN/QMR/SERTIFIKAT/10/2021.

Gambar 5.1. Sertifikat Akreditas Penjaminan Mutu PTUN Palangkaraya



B. Pembangunan Zona Integritas

Dasar hukum dalam pembangunan zona integritas PTUN Palangkaraya, yaitu: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 691B/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

Pelaksanaan pembangunan zona integritas sebagai satu bentuk tanggungjawab Tim Zona Integritas dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tahun 2024 sebagaimana penugasan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melaksanakan program kerja pembangunan zona integritas selama tahun 2024 dengan cukup baik dibuktikan dengan PTUN Palangkaraya dapat lolos seleksi administrasi zona integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) secara Mandiri dan sebagai salah satu satuan kerja di bawah Ditjen Badilmiltun yang diusulkan sebagai satuan kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2024, sehingga untuk target dalam pencapaian pembangunan zona integritas tahun 2025 adalah dapat lolos untuk memperoleh gelar Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

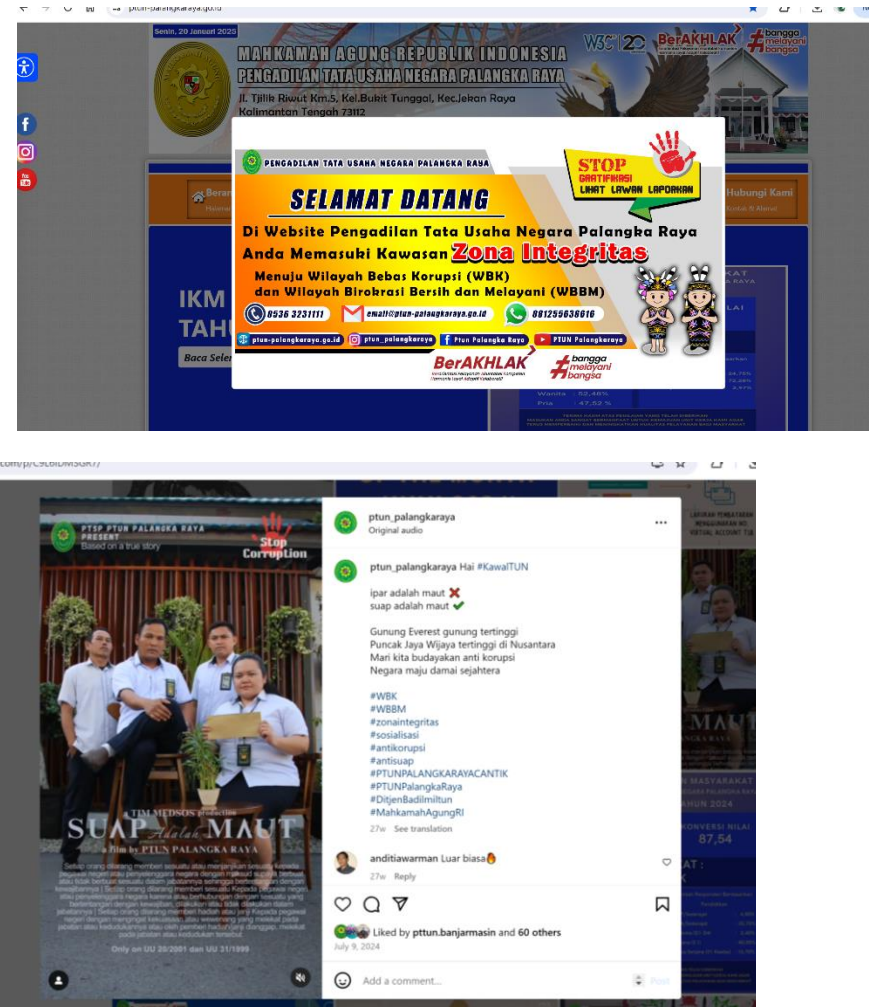
PTUN Palangkaraya telah memiliki rencana kerja pembangunan zona integritas dengan dibuktikan adanya SK rencana kerja pembangunan ZI dan telah menentukan target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK sebagaimana tertuang dalam SK rencana kerja pembangunan ZI. PTUN Palangkaraya telah melakukan pengelolaan media interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* secara berkala yang dibuktikan dengan adanya pencaangan ZI dan dipublikasikan melalui kegiatan *public campaign*, sosialisasi ZI, komitmen melalui penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja secara berkala di awal tahun. Pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

yang dibuktikan melalui laporan pembangunan ZI yang dibuat oleh Ketua Tim ZI. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan melibatkan pimpinan dan telah dilakukan secara berkala dengan adanya laporan monitoring ZI secara berkala. Catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK telah ditindaklanjuti melalui laporan monitoring ZI.

Pubic Campaign dan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas lainnya



Public Campaign dengan Banner dan Website



C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur, terjangkau serta pelayanan yang prima, akuntabel, anti KKN, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan perubahan system pelayanan secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu kesatuan sesuai dengan arahan dan instruksi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 08 Agustus 2018.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian biaya panjar perkara hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk terus dapat memberikan pelayanan yang prima, Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangkaraya terus melakukan perbaikan sarana prasarana, salah satunya merehab Ruang PTSP menjadi lebih baik lagi serta juga terus berupaya melengkapi fasilitas yang ada di ruang PTSP seperti Ruang Tunggu, sarana administrasi dan penunjang lainnya.

Sampai dengan Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melakukan berbagai perbaikan pada sarana prasarana ruang PTSP diantaranya sebagai berikut:

Gambar 5.2 Ruang PTSP Tahun 2021



Gambar 5.3 Ruang PTSP Tahun 2022



Gambar 5.4 Ruang PTSP Tahun 2023



Gambar 5.5 Ruang PTSP Tahun 2024



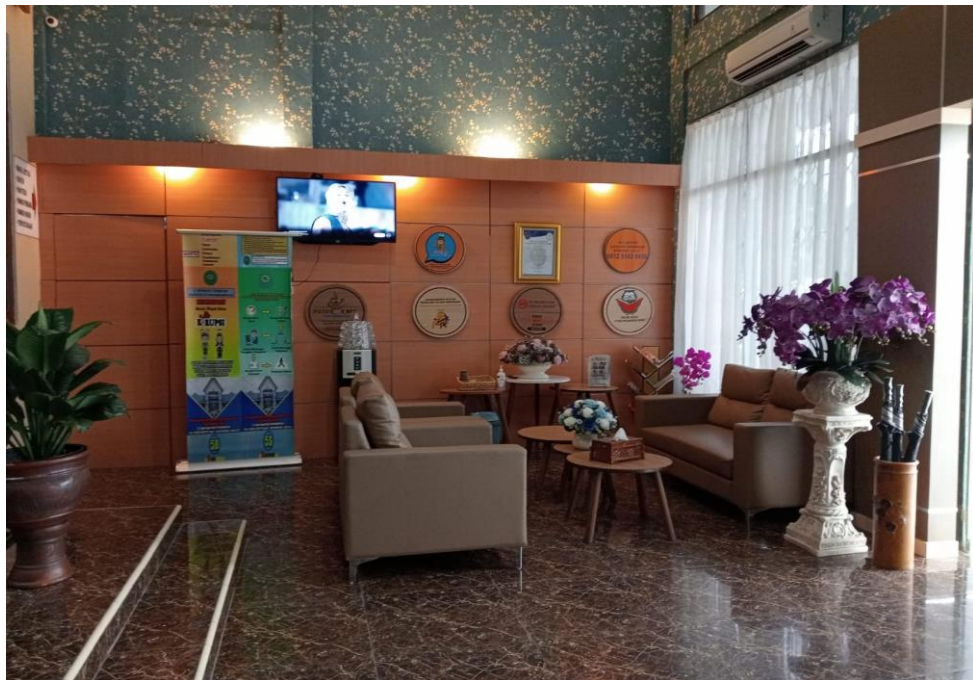
Gambar 5.6 Ruang Tunggu Tahun 2021



Gambar 5.7 Ruang Tunggu Tahun 2022



Gambar 5.8 Ruang Tunggu Dan Ruang Tunggu Prioritas Tahun 2023



Gambar 5.9 Ruang Tunggu Dan Ruang Tunggu Prioritas Tahun 2024



Gambar 5.10 Genset 80 KVA (Pengadaan Tahun 2022)

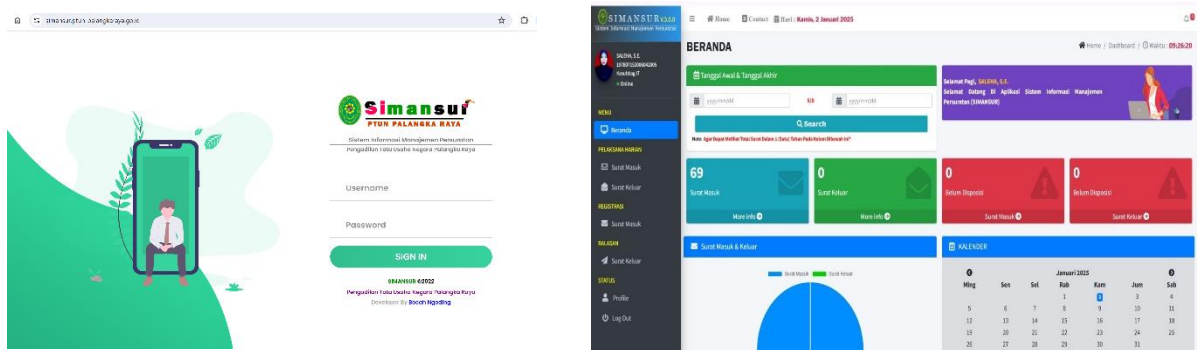


D. Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melakukan banyak perubahan terutama dalam hal perbaikan sarana dan prasarana khususnya sarana dan prasarana PTSP. Dalam rangka meningkatkan pelayanan peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan inovasi pelayanan publik sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilmitun Nomor: 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan inovasi pada Meja Kesekretariatan. PTSP pada Meja Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki tugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang dikeluarkan kesekretariatan. Surat Keluar dan Surat Masuk yang dikelola Meja Kesekretariatan dalam pelayanan sehari-hari sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang telah dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi **Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMANSUR)**.

Gambar 5.11 Tampilan Aplikasi Simansur



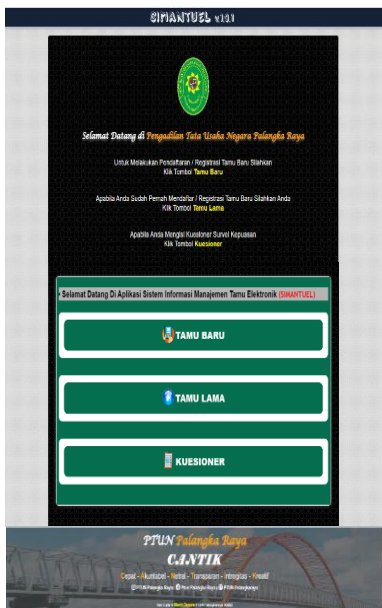
Untuk memberikan pelayanan yang optimal cepat dan berbiaya murah, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga memberikan inovasi layanan bagi pencari keadilan untuk mendapatkan informasi ataupun hanya sekedar bertanya mengenai permasalahannya melalui **WA CENTER** melalui **Aplikasi SIYAP (Sistem Informasi Pelayanan Cepat)**. Dengan adanya WA Center diharapkan memenuhi keinginan para pencari keadilan untuk respon cepat terhadap penyelesaian atau jawaban yang tepat atas keluhan mereka.

Gambar 5.12 Tampilan WA Center Aplikasi SIYAP



Di akhir Tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga melakukan inovasi pada pelayanan di PTSP melalui **Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tamu Elektronik yang disingkat SIMANTUEL**. Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang dipergunakan untuk memudahkan para pihak yang hadir dalam persidangan dalam mengisi buku tamu dan sekaligus sebagai absensi persidangan secara elektronik. Selain itu, untuk menampung keluhan, kritik dan saran atas pelayanan di PTUN Palangkaraya guna terus memperbaiki kinerja pengadilan dan pelayanan publik dalam aplikasi ini juga terdapat Survei Kepuasan Publik.

Gambar 5.13 Tampilan Aplikasi Simantuel

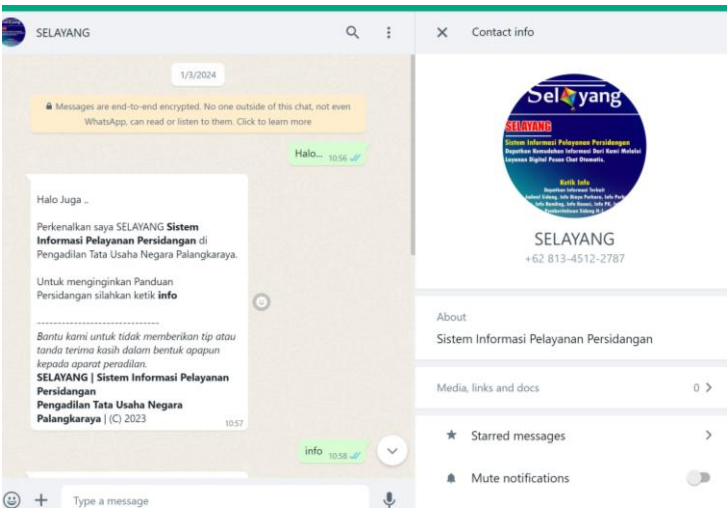


Pada Tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga telah me-*launching* berbagai aplikasi inovasi diantaranya :

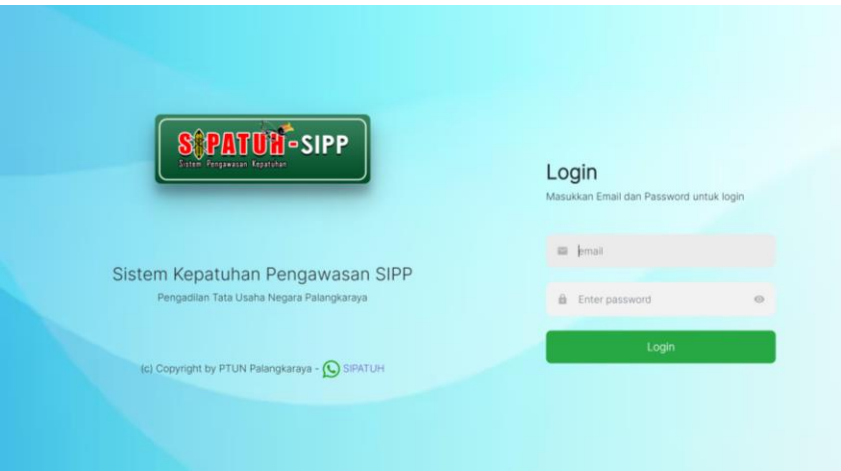
- Aplikasi SELAYANG (Sistem Informasi Pelayanan Persidangan), yaitu adalah layanan informasi *autoreply* info perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Aplikasi SIPATUH-SIPP (Sistem Kepatuhan–SIPP), yaitu aplikasi internal yang digunakan oleh pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Aplikasi SIPAKU (Informasi Penelusuran Pengawasan Eksekusi) adalah Aplikasi yang merupakan inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengenai Informasi Penelusuran Eksekusi berbasis Teknologi Informasi. Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan proses pemantauan pelaksanaan pengawasan eksekusi putusan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Dan sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan guna memberikan informasi dan pelayanan publik lebih baik lagi, pada tanggal 30 November 2023 PTUN Palangkaraya me-*launching* Website PTUN Palangkaraya dengan tampilan dan fitur baru yang lebih inovatif dan menarik.

Gambar 5.14 Tampilan Aplikasi autoreply Selayang



Gambar 5.15 Tampilan Aplikasi internal Sipatuh-SIPP



Gambar 5.16 Tampilan aplikasi sipaku



Gambar 5.17 Tampilan Website baru PTUN Palangkaraya
(www.ptun-palangkaraya.go.id)



Untuk memberikan informasi dan pelayanan publik terbaik, pada tahun 2024 PTUN Palangkaraya meluncurkan/launching inovasi terbaru yang terkoneksi dalam website PTUN Palangkaraya yaitu Aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Aplikasi PPID merupakan media layanan informasi, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik serta SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Gambar 5.18 Tampilan Website PPID PTUN Palangkaraya (www.ppid-ptun-palangkaraya.go.id)



➤ **Penghargaan-penghargaan**

Selama tahun 2024 proses peningkatan pelayanan terus dilaksanakan oleh PTUN Palangkaraya dan telah mendapatkan beberapa penghargaan apresiasi dari berbagai pihak, diantaranya:

Tabel 5.1 Daftar penghargaan PTUN Palangkaraya tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan
1	Juara II Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50	Anugerah Ketua Mahkamah Agung RI
2	Peringkat I Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan BebaBeban Perkara 0-50	Anugerah Ketua Mahkamah Agung RI
3	Peringkat I Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50	Anugerah Ketua Mahkamah Agung RI
4	Juara II Pelaporan Perkara Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
5	Badan Publik Peringkat IX Informatif Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 5.19 Piagam Penghargaan PTUN Palangkaraya





BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



BAB VI PENGAWASAN



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam penerapan dan optimalisasi sistem pengawasan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan 2 (dua) sistem pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan Melekat

Adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan, pengawasan internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 691A/KPTUN.W6-TUN4/SK.PW1.1.1/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang Pada PTUN Palangkaraya.

B. Evaluasi

Dalam melakukan tugas pengawasan, Hakim Pengawas Bidang harus senantiasa berpegang pada Buku IV Mahkamah Agung tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan. Hakim Pengawas Bidang juga secara objektif menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Pengawas sebulan sekali dan

selanjutnya koordinator akan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan dan kinerja masing-masing bidang sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua PTUN Palangkaraya Nomor : 691A/KPTUN.W6-TUN4/SK.PW1.1.1/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada PTUN Palangkaraya antara lain sebagai berikut:

Tabel 6.1 Daftar Hakim Pengawas Bidang

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUAN G	JABATAN	TUGAS
1	DESY WULANDARI, SH., MH NIP. 19780426 200112 2 001	PEMBINA TK. I (IV/b)	WAKIL KETUA/HAKIM MADYA MUDA PTUN PALANGKARAYA	KOORDINATOR
2	LAILATURRAHMAH, S.H. NIP. 19920401 201712 2 002	PENATA MUDA TK.I (III/b)	HAKIM PRATAMA MUDA PTUN PALANGKARAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN PERKARA DAN PTSP
3	FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn. NIP. 19940401 201712 2 004	PENATA MUDA TK.I (III/b)	HAKIM PRATAMA MUDA PTUN PALANGKARAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
4	BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. NIP. 19930219 201712 2 001	PENATA MUDA TK.I (III/b)	HAKIM PRATAMA MUDA PTUN PALANGKARAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN HUKUM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

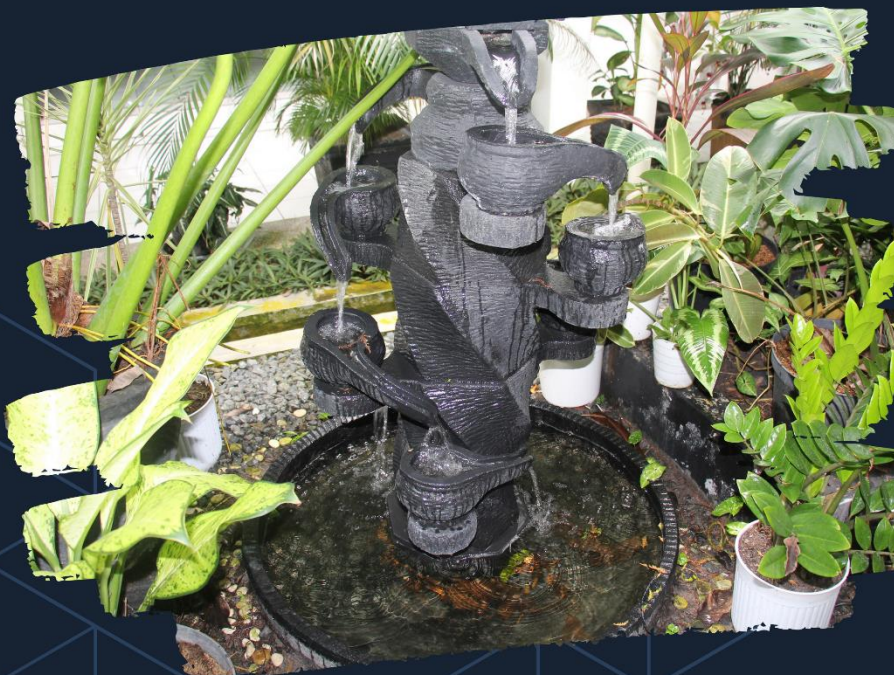


BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



BAB VII PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gedung pengadilan yang belum memenuhi syarat/*prototype* seperti arahan Mahkamah Agung RI
2. Rumah Dinas Jabatan Hakim yang dimiliki Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berjumlah 7 (tujuh) unit. Untuk Rumah Dinas Tenaga Teknis seperti Panitera/Panitera Pengganti belum tersedia.
3. Perlu adanya penambahan kendaraan bermotor dan mobil dinas khususnya untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki Generator Set dengan daya 80 KVA guna mengantisipasi pemadaman aliran listrik.
5. Aplikasi Pengaduan Online (SIWAS Mahkamah Agung RI) memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan pengadilan dan kode etik pegawai.
6. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI memberikan informasi aktual proses perkara di Pengadilan.
7. Aplikasi *e-Court* memudahkan advokat untuk mendaftarkan perkara tanpa harus datang ke Pengadilan.
8. Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) memudahkan kontrol pelaksanaan aplikasi SIPP.
9. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memberikan berbagai inovasi pelayanan publik diantaranya Aplikasi SIMANTUEL (Sistem Informasi Manajemen Tamu Elektronik), Aplikasi SIMANSUR (Sistem Informasi Manajemen Persuratan), Aplikasi SIYAP (Sistem Informasi Pelayanan Cepat), Aplikasi SELAYANG (Sistem Informasi Pelayanan Persidangan), Aplikasi SIPATUH (Sistem Informasi Kepatuhan)-SIPP, Aplikasi SIPAKU (Informasi Penelusuran Pelaksanaan Eksekusi) dan Aplikasi PPID (Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi).

B. Rekomendasi

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara berkesinambungan terus melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang kinerja Pengadilan khususnya pada sarana prasarana PTSP dan sarana prasarana disabilitas.
2. Harapan besar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya segera memiliki gedung memenuhi kriteria/*prototype* sesuai dengan arahan dan petunjuk Mahkamah Agung RI tidak waktu lama akan segera terwujud.
3. Berbagai inovasi yang menunjang kinerja pegawai telah memberi arahan jelas akan integritas ASN akan visi dan misi satuan kerja.
4. Dengan Sistem pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mencegah tindakan serta perilaku/perbuatan tercela yang dilakukan oleh setiap warga aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.



LAMPIRAN



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 691A/KPTUN.W6-TUN4/SK.PW1.1.1/VIII/2024

TENTANG

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah lembaga yang menyelenggarakan Fungsi Peradilan dalam bidang Teknis Peradilan, Pengelolaan Administrasi Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Umum Peradilan agar terwujud pelayanan publik yang baik;
 - b. Bahwa, untuk mengendalikan agar fungsi Lembaga Peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya diperlukan Pengawasan terhadap setiap bidang secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
 - c. Bahwa, pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan dan kinerja masing-masing bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/036/SK/VII/1993, tanggal 17 Juli 1993, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Keputusan

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/007/SK/IV/1994, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, tanggal 1 April 1994;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, tanggal 24 Agustus 2006;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2004, tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran, tanggal 24 Desember 2004 *jo.* Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 309/SEK/01/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 117/KPTUN.W6-TUN4/SK.PW1.1.1/I/2024, tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 8 Januari 2024;
- KEDUA** : Menunjuk kembali Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum pada Lajur 2 dan 4 dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang;
- KETIGA** : Bahwa dalam melakukan tugas pengawasan, Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk tersebut harus senantiasa berpegang pada Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- KEEMPAT** : Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara obyektif dan menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Pengawas per 1 (satu) bulan sekali dan selanjutnya Koordinator Pengawas melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

KetuaPengadilanTata Usaha Negara Palangkaraya,



ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin (*sebagailaporan*);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peninggal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Nomor : 691A/KPTUN.W6-TUN4/SK.PW1.1.1/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus2024
Tentang : Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	TUGAS HAKIM PENGAWAS
1	2	3	4	5
1	DESY WULANDARI, S.H., M.H. NIP. 197804262001122001	PembinaTk I (IV/b)	Wakil Ketua/ Hakim MadyaMuda PTUN Palangkaraya	KOORDINATOR
2	LAILATURRAHMAH, S.H. NIP. 199204012017122002	PenataMuda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangkaraya	Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Perkara dan PTSP
3	FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn. NIP. 199404012017122004	PenataMuda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangkaraya	Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Umum dan Keuangan
				Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
4	BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. NIP. 199302192017122001	PenataMuda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangkaraya	Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum
				Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN


LAPORAN PERKARA TAHUNAN
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2024

Formulir LI - T14

NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	DISMISSAL	PERLAWANAN	CABUT	PUTUS	SISA	PERMOHONAN				KETERANGAN
									BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PERTANAHAN	6	9	-	-	2	10	3	6	3	-	2	
2	KEPEGAWAIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PERIZINAN	1	1	-	-	-	2	-	2	2	-	-	
4	LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	TENDER/PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BADAN HUKUM/PARPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	4	9	2	-	1	9	1	7	1	-	-	
8	KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	PROSES PEMILIHAN UMUM	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
10	PENGGANTIAN ANTAR WAKTU	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
11	KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	K I P	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
13	PENGADAAN TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	FIKTIF POSITIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	PENYALAHGUNAAN WEWENANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1	2	-	-	-	3	-	2	2	-	-	
		-	5	1	-	1	1	2	-	-	-	1	
17	LAIN LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	14	27	3	-	4	28	6	17	8	0	4	1 Perkara tidak lolos dismissal mengajukan perlawanan

MENGETAHUI,
KETUA,

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.
NIP. 197506022000122002

Palangka Raya, 6 Januari 2025
PANITERA,

BUDIYONO, S.H., MM
NIP. 196905161990031004